



RENSTRA 2025-2029

KECAMATAN SEBERANG KOTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunianya telah selesai disusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kecamatan Seberang Kota yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seberang Kota 2025-2029 menentukan Prioritas Program dan Kegiatan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan, diharapkan berbagai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh karena itu arahan dan masukan berbagai pihak sebagai bahan perbaikan serta penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya kami tak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi sehingga penyusunan Renstra Kecamatan Seberang Kota 2025-2029 dapat diselesaikan.

Tungkal V, Oktober 2025

CAMAT SEBERANG KOTA



AHMAD HUSAINI, SE, MM

Pembina

NIP. 19750529 201001 1 0007

			hal
Kata Pengantar			
Daftar Isi			1
BAB I	:	PENDAHULUAN	2
1.1		Latar Belakang	2
1.2		Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3		Maksud dan Tujuan	4
1.4		Sistematika Penulisan	4
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG KOTA	6
2.1		Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	6
2.2		Sumber Daya Manusia pada Kecamatan	13
2.3		Kinerja Pelayanan Kecamatan	33
2.4		Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	42
BAB III	:	PERMASALAHAN, TELAAHAN, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
3.1		Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	50
3.2		Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih	51
3.3		Tujuan dan Sasaran	53
3.4		Strategi dan Arah Kebijakan	59
BAB IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
4.1		Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	74
4.2		Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan	97
BAB V	:	PENUTUP	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seberang Kota Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan telah berakhirnya RPJMD tahun 2021-2026 dan telah dilantiknya Kepala Daerah Periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 serta mempedomi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dimana perangkat Daerah diwajibkan menyusun kembali Renstra Perangkat Daerah, Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Seberang Kota selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Kecamatan Seberang Kota Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Seberang Kota ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kemudian Renstra Kecamatan Seberang Kota yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
4. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seberang Kota disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Seberang Kota.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pedoman bagi Kecamatan Seberang Kota dalam penyusunan rencana kerja tahunan untuk periode 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Seberang Kota Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Memberikan acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Seberang Kota yang merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Kecamatan Seberang Kota yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan
- b. Memberikan arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan oleh Kecamatan Seberang Kota agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Dokumen Renstra Kecamatan Seberang Kota Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar hukum penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG KOTA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Manusia Pada Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

BAB III : PERMASALAHAN, TELAAHAN, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Tujuan dan Sasaran
- 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 721 sampai dengan pasal 751 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah :

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

Camat mempunyai tugas ;

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Camat menyelenggarakan fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan oemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- (1). Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan ;
 - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
 - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan linhkup umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- (1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
 - c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
 - d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
 - e. Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
 - g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;

- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ; dan
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
 - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
 - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
 - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
 - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
 - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan da kebijakan pemerintah daerah;
 - c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi sdan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
 - d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
 - e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
 - f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Seberang Kota saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Seberang Kota merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

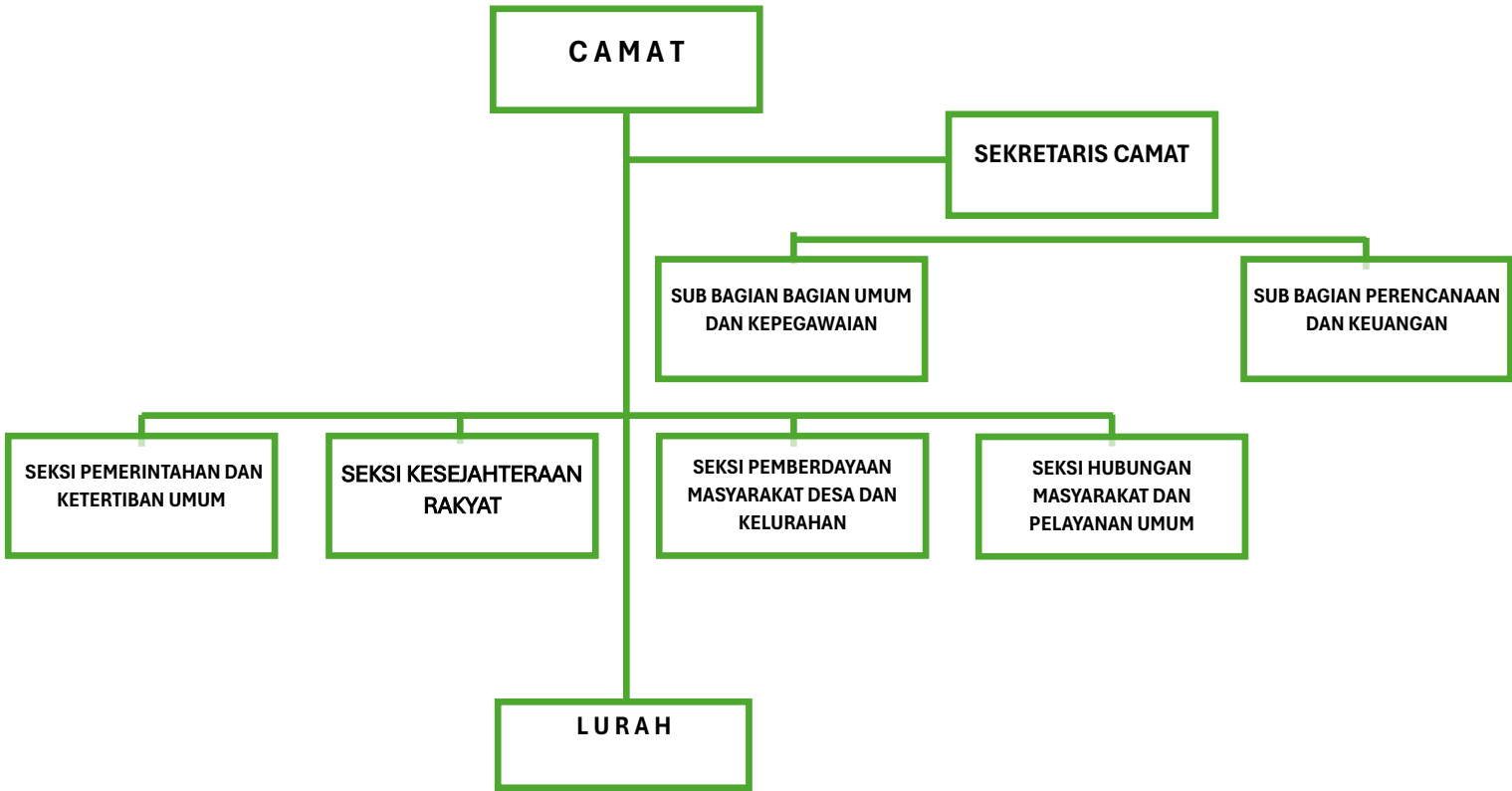
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

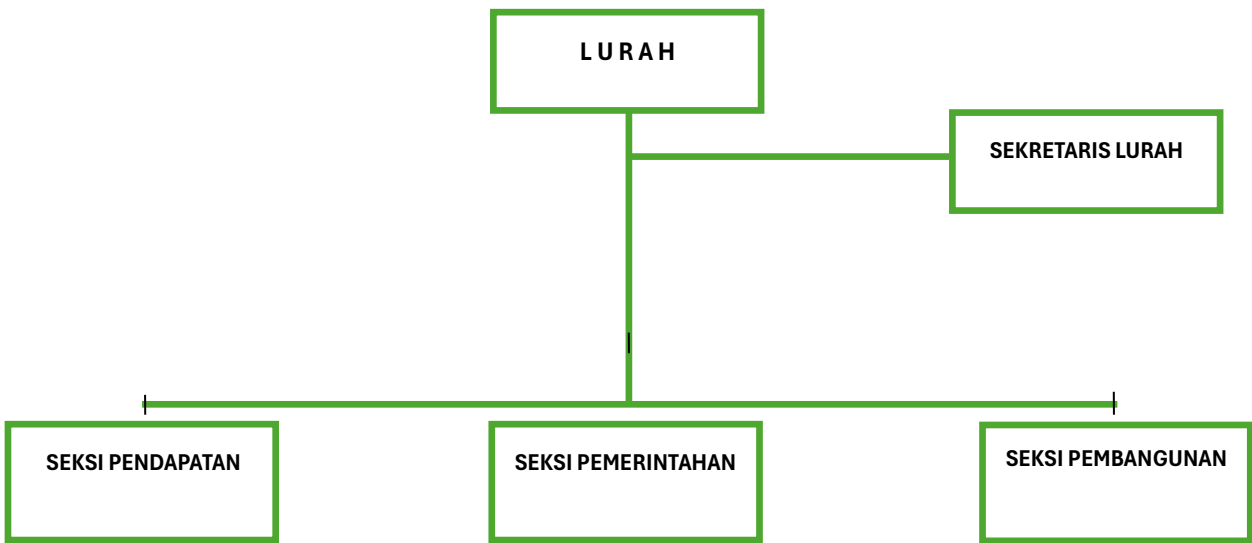
- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- f. Kelurahan terdiri atas:
 1. Sekretariat Kelurahan;
 2. Seksi Pendapatan;
 3. Seksi Pemerintahan; dan
 4. Seksi Pembangunan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023



Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023



1.2 SUMBER DAYA MANUSIA PADA KECAMATAN

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 20 orang yang terdiri dari ASN, P3K dan Non ASN / Tenaga Kerja Kontrak. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel a.1 berikut :

Tabel a.1
Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Seberang Kota dan Kelurahan Tungkal V
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat / Jabatan	Golongan / Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1	-	1
2	Penata Tk. I	III/d	4		4
2	Penata	III/c	2	-	2
3	Penata Muda Tk. I	III/b	-	1	1
4	Pengatur Tk.I	II/d	1	-	1
5	Pengatur	II/a	1	-	1
6	P3K	V	1		1
		IX	1		1
7	Non ASN/ Tenaga Kerja Kontrak	-	4	4	8
	Total		15	5	20

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih berstatus tenaga kerja kontrak sebanyak 8 orang.

- a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III sebanyak 2 orang dan eselon IV sebanyak 5 orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel a.2.

Tabel a.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Seberang Kota dan Kelurahan Tungkal V yang menduduki
Jabatan dan Staf tahun 2025

No.	Uraian	Eselon				Non Eselon	Pegawai	Jumlah
		III/a	III/b	IV/a	IV/b	/ Staf / Fungsional / P3K	Kontrak / TKK	
1.	Kantor Kecamatan Seberang Kota	1	1	3	-	3	6	14
2.	Kantor Kelurahan Tungkal V			1	1	2	2	6
	Total	1	1	4	1	5	8	20

b. Posisi Jabatan yang ada di Kecamatan Seberang Kota dan Kelurahan Tungkal V Kabupaten
Tanjung Jabung Barat masih banyak terdapat Jabatan yang belum terisi, Selengkapnya
dapat dilihat pada tabel a.3 :

Tabel a.3

Posisi Jabatan yang diduduki di Kecamatan Seberang Kota dan Kelurahan Tungkal V
berdasarkan yang menduduki Posisi Jabatan Eselon III dan IV Tahun 2025

No.	Jabatan	Eselon	Keterangan
1	Camat	III/a	terisi
2	Sekretaris Camat	III/b	terisi
3	Kasi PEM dan Tibum	IV/a	terisi
4	Kasi PMD	IV/a	terisi
5	Kasi Kesra	IV/a	terisi
6	Kasi Humas	IV/a	Belum terisi
7	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	IV/b	Belum terisi
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV/b	Belum terisi
9	Lurah	IV/a	terisi

10	Kasi Pendapatan	IV/b	terisi
11	Kasi PEM	IV/b	Belum terisi
12	Seklur	IV/b	Belum terisi
13	Kasi Pembangunan	IV/b	Belum terisi

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Tabel a.4

Jumlah Pegawai Kecamatan Seberang Kota dan Kelurahan Tungkal V Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata-2 (S2)	3
2.	Strata-1 (S1)	10
3.	Sarjana Muda/ D3	-
4	SLTA/SMK	6
5	Paket C	1
	Jumlah	20

Dari Tabel – tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikatakan belum memenuhi kebutuhan guna memaksimalkan Standar Pelayanan Minimum, hal ini menjadi perhatian Pemkab Tanjab Barat khususnya pada pengisian Jabatan yang masih kosong, dan jumlah staf yang dianggap relevan. Dengan demikian diharapkan nantinya dengan terisinya semua jabatan dan jumlah staf yang memadai tersebut, maka keberhasilan kinerja Kecamatan nantinya bisa menjadi tolak ukur yang jelas.

d. Aset

Selain sumber daya Aparatur, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Seberang Kota harus didukung oleh Sarana dan Prasarana (Aset). Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Seberang Kota didukung dengan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Mesin (KIB B), sebagaimana berikut ini :



Provinsi : PROVINSI JAMBI
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Bidang : Bidang Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN SEBERANG KOTA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

No	Kode Barang (1.3.)	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga	Keterangan	Kondi si	KA	OPD
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	15	HONDA / WIN MCB 97 CCSPORT			1993		MHIHABAIXVK004 176	HABAE-1004244	BH 5291 HZ	6900472 F	Pembelian	4.880.000,00	Kes sebrang kota (semester 2)	KB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	HONDA WIN / MCB 97 SPORT Brother	-	Campuran	1997	-	MHIHABAIXVK004 176	HABAB-1004244	BH 5291HZ	6900472 F	Pembelian	5.100.000,00	Diperbaiki & dipakai TTK (Syuhairi Nour)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1			Besi	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	250.000,00	Mesin Ketik		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2	Hugmer		Besi	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	120.000,00	Mesin Ketik		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2	-		campuran	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	150.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	-		Besi	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	350.000,00	Brankas		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	1	-	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	120.000,00	Papan Data	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	2	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	30.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.05.02.01.004	Kursi Kayu	1	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.05.02.01.004	Kursi Kayu	10	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.05.02.01.004	Kursi Kayu	11	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.05.02.01.004	Kursi Kayu	12	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.05.02.01.004	Kursi Kayu	13	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
	02.05.02.01.004	Kursi Kayu	14	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.05.02.01.004	Kursi Kayu	15	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	16	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	17	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	18	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	19	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	2	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	20	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	21	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	22	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	23	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	24	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	25	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	26	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	27	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	28	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	29	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	3	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	30	-		kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.05.02.01.004	Kursi Kayu	4	-	-	kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan	-	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	5	-	-	kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan	-	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	6	-	-	kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan	-	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	7	-	-	kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan	-	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	8	-	-	kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan	-	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	9	-	-	kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	15.000,00	Tidak ditemukan	-	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.033	Kursi Biasa	1	-	-	Campuran	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	600.000,00	kursi	-	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	-	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	195.000,00	Meja Kerja	-	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	-	Campuran	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	260.000,00	Meja Kerja	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	1	HONDA / WIN	-	-	2004	-	HABD194K44761	HABDE-1045393	BH 5663 EZ	C-9510860	-	10.200.000,00	Syuhairi Nour (TKK/Staff Administrasi)	-	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2	HONDA / WIN	-	Campuran	2004	-	MH1HABD194K044758	HABDE-1045395	BH 5660 EZ	C-9510857	Pembelian	10.200.000,00	Tajuddin (Peleksana Administrasi Umum)	KB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	2	HONDA / MEGA PRO	-	Campuran	2008	-	MH1KC1111BK188843	KC11E-1190836	BH 6089 EZ	F-6860556F	Pembelian	16.825.000,00	KASI PMD DAN KELURAHAN	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inc)	1	OLYMPIA	-	-	2009	-	-	-	-	-	-	4.970.000,00	Kasubbag Keuangan	-	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.04.002	Lemari Kayu	1	-	-	Campuran	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	9.900.000,00	Ruang Kasi	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.05.005	White Board	1	-	-	Campuran	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	1.580.000,00	Aula	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.008	Meja Rapat	1	-	-	-	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	7.975.000,00	Ruang Kasi	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.031	Kursi Tamu	1	-	-	-	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	4.975.000,00	Ruangan Camat	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.06.020	Stabilisator	1	AVR OKI	-	-	2009	-	-	-	-	-	-	490.000,00	Ruangan Sekcam	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.06.01.02.093	Gear Box Sun Assy	1	-	-		2010	-	-	-	-	-	-	2.825.000,00	-		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.03.47.002	Genset	2	Teriko Ryu RS3800	-	Campuran	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	4.480.000,00	Mesin Genset	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.001	P.C Unit	2	-	-	-	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	19.730.000,00	-	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.03.47.002	Genset	1	-	-	Besi	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	99.876.000,00	Mutasi dari Pengelola (ex ESDM) Tahun 2017	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.03.47.002	Genset	5	-	-	Campuran	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	4.975.000,00	Mesin Genset	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.03.47.002	Genset	6	-	-	Campuran	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	4.975.000,00	Mesin Genset	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	16	HONDA / SUPRA X 125 R		Campuran	2012		MH1JB9131CK2126 46	J891E-3202712	BH 6571 EZ	J-04077771 F	Pembelian	14.097.400,00	Effendy, SE (Pengawas Lurah Tungkal V)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	17	HONDA / SUPRA X 125R-	124 CC		2012	-	MH1JB9130CK2126 54	J891E- 3202642	BH 6586 EZ	J- 04077594 F		14.097.400,00	Perolehan dari dana PBB P2 (Kades teluk pulau raya)	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	18	HONDA / SUPRA X 125R-	124.8 CC		2012	-	MH1JB9134CK2126 11	J891E-3201884	BH 6603 EZ	J-04077707 F		14.097.400,00	Ujianto, S.Sp.I (KEPALA DESA TUNGKAL IV DESA)	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	3	YAMAHA / MIO SOUL 1 KP A/T	-	Campuran	2012	-	MH31KP001CK231 729	1KP-231890	BH 6628 EZ	J-04379586 F	Pembelian	13.726.000,00	A.Sodik (Pelaksana Administrasi Umum)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.03.02.010	alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	1	-	-		2012	-	-	-	-	-		17.900.000,00	Pompong / Ketek	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 lnd)	1	Brother	-		2012	-	-	-	-	-		4.000.000,00	-		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.04.002	Lemari Kayu	2	-	-	Kayu	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	7.500.000,00	-	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.05.081	Teralis	1	-	-	Campuran	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	14.795.000,00	Teralis	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	1	-	-	Kayu	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	7.200.000,00	-	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.004	Kursi Kayu	1	-	-	Kayu	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	1.800.000,00	-	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.05.02.01.031	Kursi Tamu	3	-	-	Kayu	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	7.400.000,00	-	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.04.006	Kipas Angin	2	sanex	-	Campuran	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	1.000.000,00	-	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.02.02.001	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	-	-	-	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	29.500.000,00	Kantor Camat Seko	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.03.47.002	Genset	3	-	-	Campuran	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	19.800.000,00	Mesin Genset	KB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.03.47.002	Genset	4	-	-	Besi	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	49.900.000,00	Mutasi dari Pengelola (ex ESDM) Tahun 2017	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.001	P.C Unit	3	ACER	-	-	2012	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	-	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	4	Honda / Supra X 125 CW	124,8 CC	-	2013	-	MH1JB9132DK515 176	JB91E 3497774	BH 6849 EZ	K-03792565F	-	15.780.000,00	Kades Tungkal IV Desa (Mutasi dari Dispenda SK Pengalihan Status No.3/768/ASSE T/215 Tgl 27Agustus 215)	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	5	Honda / Supra X 125 CW	124,8 CC	Campuran	2013	-	MH1JB9139DK519 774	JB91E 3502302	BH 6837 EZ	K-03791993	Pembelian	15.780.000,00	Kades Kuala Baru (Mutasi dari Dispenda SK Pengalihan Status No. 3/768/ASSET/2 15Tgl 27 Agustus 215)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	6	Honda / Supra X 125 CW	124,8 CC	Campuran	2013	-	MH1JB9135DK519 707	JB91E 3502396	BH 6840 EZ	K-03792178	Pembelian	15.780.000,00	KASI PENDAPATAN LURAH TUNGKAL V (M. BENYAMIN SIREGAR, ST) (Mutasi dari Dispenda) SK Pengalihan Status No.768/ASSET/ 215Tgl. 27 Agustus 215	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.06.012	Wireless	1	-	-	Campuran	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	4.950.000,00	-	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.10.01.02.001	P.C Unit	4	Accer	-		2013	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	Kantor Camat Seko	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.001	P.C Unit	5	ACER	-		2013	-	-	-	-	-	-	7.975.000,00	-	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.002	Lap Top	1	TOSHIBA	-		2013	-	-	-	-	-	-	9.800.000,00	Muthmainnah Sri Pratiwi, S.Hut (Pengawas Kasubbag Umum Dan Kepegawaian)		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.002	Lap Top	2	ACER	-	Campuran	2013	-	-	-	-	-	-	9.900.000,00	Mokh. Setiawan, SE (Pengawas kasi PMD Dan K)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	10	Yamaha / Jupiter Z CW	108 cc	Campuran	2014	-	MH31DY008EJ285 075	1DY-285096	BH 6898 EZ	K-09690133F	Pembelian	14.425.000,00	Kades Muara Seberang (Mutasi dari Dispenda SK Pengalihan Status No.3/768/ASSE T/215 Tgl 27Agustus 215)	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	11	Honda / Supra X 125 AFX12U21C0 8 M/T	124.89 CC	Campuran	2014	-	MH1JBP118EK1831 18	JBP1E-1183103	BH 6995 EZ	L- 03919861 F	Pembelian	16.400.000,00	M, Hendra, SE (Pengawas Kasi Pemerintahan)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	12	Honda / Supra X 125 AFX12U21C0 8 M/T	124.89 CC	Campuran	2014	-	MH1JBP115EK1832 06	JBP1E-1183053	BH 6998 EZ	L- 03919860 F	Pembelian	16.400.000,00	Suwanti, S. Sos (Analisis Kepegawaian/P elaksana bendahara Pengeluaran)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	13	Honda / Supra X 125 AFX12U21C0 8 M/T	124.89 CC	Campuran	2014	-	MH1JBP113EK1832 05	JBP1E-1183056	BH 3007 EZ	L- 03919975 F	Pembelian	16.400.000,00	Mok. Setiawan, SE (Pengawas Kasi PMD Dan K)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	14	Honda / Supra X 125 AFX12U21C0 8 M/T	124.89 CC	Campuran	2014	-	MH1JBP116EK1833 61	JBP1E-1183157	BH 6997 EZ	L- 03919859 F	Pembelian	16.400.000,00	Muthmainnah Sri Pratiwi, S.Hut (Pengawas Kasubbag UmumDan kepegawaian)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.02.01.04.001	Sepeda Motor	7	Yamaha / Jupiter Z CW	108 cc	Campuran	2014	-	MH31DY008EJ280 984	1DY-280971	BH 6896 EZ	K-09690135	Pembelian	14.425.000,00	Kades Mekar Alam (Mutasi dari Dispeda SK Pengalihan Status No. 3/768/ASSET/2 15Tgl 27 Agustus 215)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	8	Yamaha / Jupiter Z CW	108 cc	Campuran	2014	-	MH31DY008EJ280 919	1DY-280877	BH 6903 EZ	K-09690129	Pembelian	14.425.000,00	Kades harapan Jaya (Mutasi dari Dispenda SK Pengalihan Status No. 3/768/ASSET/2 15Tgl 27 Agustus 215)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	9	Yamaha / Jupiter Z CW	108 cc	Campuran	2014	-	MH31DY008EJ285 071	1DY-285091	BH 6897 EZ	K-09690134	Pembelian	14.425.000,00	Kades Kuala Kahar AN. SUNARI (Mutasi dari Dispenda SK Pengalihan Status No. 3/768/ASSET/2 15Tgl 27 Agustus 215)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	-	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	Ruangan Camat	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	2	-	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	Ruangan Sekcam	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	3	-	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	Ruangan Kasi	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.05.081	Teralis	2	-	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	28.350.000,00	Teralis Kantor	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	1	-	-	Staeinles	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	3.500.000,00	Tempat Tunggu	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.008	Meja Rapat	1	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	14.650.000,00	Sblh Ruang Camat	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	1	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.400.000,00	Meja Kerja 1/2 Biro	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	2	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.400.000,00	Meja Kerja 1/2 Biro	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	3	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.400.000,00	Meja Kerja 1/2 Biro	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	112	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	113	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	114	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	115	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	116	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	117	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	118	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	119	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	12	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	120	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	121	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	122	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	123	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	124	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	125	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	126	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	127	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	128	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ekstra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	129	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	13	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	130	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	131	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	132	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	133	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	134	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	135	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	136	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	137	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	138	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	139	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	14	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	140	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	141	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	142	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	143	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	144	-	-	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	77.500,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.05.02.01.031	Kursi Tamu	8	-	-	Stainless	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	138.000,00	Aula	B	Ektra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.04.006	Kipas Angin	3	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	570.000,00	Ruangan Camat	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.04.006	Kipas Angin	4	-	-		2014	-	-	-	-	-		570.000,00	Ruangan Sekcam		Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.04.006	Kipas Angin	5	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	570.000,00	Aula	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.04.006	Kipas Angin	6	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	570.000,00	Aula	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.04.006	Kipas Angin	7	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	570.000,00	Ruangan Kasi	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.04.006	Kipas Angin	8	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	570.000,00	Ruang PATEN	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	1	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.425.000,00	Pembuatan Mimbar/Podium	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	2	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.425.000,00	Pembuatan Mimbar/Podium	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.06.057	Karpet	1	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.465.000,00	karpet/Ambal	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.06.057	Karpet	1	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.465.000,00	karpet/Ambal	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.06.057	Karpet	2	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.465.000,00	karpet/Ambal	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.06.057	Karpet	2	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.465.000,00	karpet/Ambal	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.06.057	Karpet	3	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.465.000,00	karpet/Ambal	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	24.650.000,00	Hampir Tiap Ruangan	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	2.370.000,00	Meja Kerja 1 biro	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	1.410.000,00	Kursi Kerja	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.001	P.C Unit	6	Lenovo	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	9.700.000,00	Desktop (Kasubbag Kepeg)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Cannon Pixma Mx 477	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	2.000.000,00	Ruangan Sekcam	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Canon MP 237	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	Printer (Untuk Kades / Lurah) Desa Pulau Raya Seberang Kota (Mutasi dari Dispenda SK Pengalihan Status No.3/981/ASSE T/215 Tgl 30Desember 215)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Canon MP 237	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	Printer (Untuk Kades / Lurah) Desa Pulau Raya Seberang Kota (Mutasi dari Dispenda SK Pengalihan Status No.3/981/ASSE T/215 Tgl 30Desember 215)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Canon MP 237	-		2015	-	-	-	-	-		1.450.000,00	Printer (Untuk Kades / Lurah) Kntn Kelurahan Tungkal V (Mutasi dari Dispenda SK Pengalihan Status No.3/981/ASSE T/215 Tgl 30Desember 215)	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.03.02.002	Motor Boat	2	mikasa		campuran	2017						Pembelian	8.900.000,00	Mesin Pompong	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	1	BENQ MS 506	-		2018	-	-	-	-	-	Pembelian	5.475.000,00	Belanja Modal Proyektor	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2	BENQ MS 506	-		2018	-	-	-	-	-	Pembelian	5.475.000,00	Belanja Modal Proyektor	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.001	P.C Unit	7	HP 20-C324D	-		2018	-	-	-	-	-	Pembelian	8.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer (PC Desktop All In One HP)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.02.01.04.001	Sepeda Motor	20	SUZUKI / GSF 150	150	CAMPURAN	2020	-	MH8DL24ANKJ-105 290	CGA2-ID-655280	BH 2082 E	P-07679772 F	Pembelian	27.000.000,00	Tyal Harianito,S,IP (Administrator Camat Seberang Kota)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.03.02.010	alat angkutan apung bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	2	-	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	74.446.900,00	PENGADAAN POMPONG	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.03.01.09.010	Reciver	1	K-VISION	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	2.365.000,00	PENGADAAN PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA TRANSPORTAL E	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.03.01.09.010	Reciver	2	K-VISION	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	2.365.000,00	PENGADAAN PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA TRANSPORTAL E	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.03.01.09.010	Reciver	3	K-VISION	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	2.365.000,00	PENGADAAN PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA TRANSPORTAL E	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	1	AVESTA M24B	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	5.940.000,00	PENGADAAN LEMARI ARSIP BESI	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2	AVESTA M24B	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	5.940.000,00	PENGADAAN LEMARI ARSIP BESI	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	3	AVESTA M24B	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	5.940.000,00	PENGADAAN LEMARI ARSIP BESI	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	4	AVESTA M24B	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	5.940.000,00	PENGADAAN LEMARI ARSIP BESI	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	5	AVESTA M24B	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	5.940.000,00	PENGADAAN LEMARI ARSIP BESI	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	1	HIKVISION 2 MP	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	3.107.500,00	PENGADAAN CCTV DAN INSTALASI	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	2	HIKVISION 2 MP	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	3.107.500,00	PENGADAAN CCTV DAN INSTALASI	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	3	HIKVISION 2 MP	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	3.107.500,00	PENGADAAN CCTV DAN INSTALASI	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	4	HIKVISION 2 MP	-	-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	3.107.500,00	PENGADAAN CCTV DAN INSTALASI	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.05.02.01.033	Kursi Biasa	7	NAPOLLY	-	2021	-	-	-	-	-	Pembelian	198.000,00	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI PLASTIK	B	Extra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.033	Kursi Biasa	8	NAPOLLY	-	2021	-	-	-	-	-	Pembelian	198.000,00	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI PLASTIK	B	Extra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.01.033	Kursi Biasa	9	NAPOLLY	-	2021	-	-	-	-	-	Pembelian	198.000,00	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI PLASTIK	B	Extra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.002	Lap Top	6	ASUS / X515	-	2021	-	-	-	-	-	Pembelian	16.995.000,00	Iyal Harianto,S,IP (Administrator Camat Seberang Kota)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	CANON / G3020	-	2021	-	-	-	-	-	Pembelian	3.498.000,00	BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	3	-	-	2022	-	-	-	-	-	Pembelian	5.000.000,00		B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	TOYOTA / RUSH 1.5 S M/T GR SPORT	-	2023	-	MHKEBFA3JPK1032 5B	2NR4828847	BH 1280 E	T-04358420 F	Pembelian	334.710.000,00	PEMEGANG AN. CAMAT SEBERANG KOTA	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.002	Lap Top	7	ASUS / Intel Core i5-1135G7	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	11.000.000,00	AN. CAMAT SEKO	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.002	Lap Top	8	ASUS / Intel Core i5-1135G7	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	11.000.000,00	AN. BENDAHARA (WANTIE)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.010	Personal Komputer lainnya	1	ASUS / Intel Core i5	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	16.098.000,00	PENGADAAN DESKTOP	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.010	Personal Komputer lainnya	2	ASUS / Intel Core i5	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	16.098.000,00	PENGADAAN DESKTOP	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	CANON / MG2570S	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	1.207.000,00	PENGADAAN PRINTER	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	CANON / G1010	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	1.725.000,00		B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	CANON / IP2770	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	804.000,00		B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	CANON / IP2770	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	804.000,00		B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	CANON / MG2570S	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	1.207.000,00	PENGADAAN PRINTER	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.10.01.02.002	Lap Top	4	ASUS A407-UA	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	9.900.000,00	Suwanti,S.Sos (Analisis Kepegawaian/P elaksana Bendahara pengeluaran) M.Hendra,Se (Pengawas Kasi Pemerintahan)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.002	Lap Top	5	ASUS A407-UA	Campuran	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	9.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	CANON G2010	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	2.490.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	CANON G2010	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	2.490.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.02.010	Mesin Absen (Time Recorder)	1	SOLUTION / X601	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	12.045.000,00	BELANJA MODAL MESIN ABSENSI, BOX KACA, KABEL JARINGAN MESIN ABSENSI KE PC UNIT, PERANGKAT JARINGAN LISTRIK UNTUK POWER MESIN ABSENSI, INSTALASI DAN KONFIGURASI APLIKASI, PELATIHAN OPERATOR MESIN, INSTALASI JARINGAN LISTRIK+LAN, BIAYA ADMINISTRASI DAN DOKU BELANJA UPS	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	600.000,00	BELANJA P.C UNIT	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.001	P.C Unit	8	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	7.135.000,00	Effendy,SE (Pengawas Lurah Tungkal V)	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	19	SUZUKI / GSF 150	150	2020	-	MH8DL24ANKI-105 488	CGA2-ID-655475	BH 2083 E	P-07679773 F	Pembelian	27.000.000,00		B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Cannon Pixma Mx 477	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	2.000.000,00	Ruangan Sekcam	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Canon MP 237	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	Printer (Untuk Kades / Lurah) Desa Pulau Raya Seberang Kota (Mutasi dari Dispenda SK Pengalihan Status No.3/981/ASSE T/215 Tgl 3Desember 215)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Canon MP 237	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	1.450.000,00	Printer (Untuk Kades / Lurah) Desa Pulau Raya Seberang Kota (Mutasi dari Dispenda SK Pengalihan Status No.3/981/ASSE T/215 Tgl 3Desember 215)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Canon MP 237	-		2015	-	-	-	-	-		1.450.000,00	Printer (Untuk Kades / Lurah) Kntz Kelurahan Tungkal V (Mutasi dari Dispenda SK Pengalihan Status No.3/981/ASSE T/215 Tgl 3Desember 215)	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.03.02.002	Motor Boat	2	mikasa		campuran	2017						Pembelian	8.900.000,00	Mesin Pompong	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	1	BENQ MS 506	-		2018	-	-	-	-	-	Pembelian	5.475.000,00	Belanja Modal Proyektor	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2	BENQ MS 506	-		2018	-	-	-	-	-	Pembelian	5.475.000,00	Belanja Modal Proyektor	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.001	P.C Unit	7	HP 20-C324D	-		2018	-	-	-	-	-	Pembelian	8.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer (PC Dektap All In One HP)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.10.01.02.002	Lap Top	4	ASUS A407-UA	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	9.900.000,00	Suwanti,S.Sos (Analisis Kepegawaian/P elaksana Bendahara pengeluaran)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.002	Lap Top	5	ASUS A407-UA	Campuran	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	9.900.000,00	M.Hendra,Se (Pengawas Kasi Pemerintahan)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	CANON G2010	-	-	2018	-	-	-	-	-	-	2.490.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	CANON G2010	-	-	2018	-	-	-	-	-	-	2.490.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.05.01.02.010	Mesin Absen (Time Recorder)	1	SOLUTION / X601	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	12.045.000,00	BELANJA MODAL MESIN ABSENSI, BOX KACA, KABEL JARINGAN MESIN ABSENSI KE PC UNIT, PERANGKAT JARINGAN LISTRIK UNTUK POWER MESIN ABSENSI, INSTALASI DAN KONFIGURASI APLIKASI, PELATIHAN OPERATOR MESIN, INSTALASI JARINGAN LISTRIK+LAN, BIAYA ADMINISTRASI DAN DOKU	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	600.000,00	BELANJA UPS	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.001	P.C Unit	8	-	-	-	2019	-	-	-	-	-	-	7.135.000,00	BELANJA P.C UNIT	RB	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.02.01.04.001	Sepeda Motor	19	SUZUKI / GSF 150	150	-	2020	-	MH8DL24ANKJ-105 488	CGA2-ID-655475	BH 2083 E	P-07679773 F	Pembelian	27.000.000,00	Effendy,SE (Pengawas Lurah Tungkal V)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA



**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	CANON / MG2570S	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	1.207.000,00	PENGADAAN PRINTER	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	CANON / MG2570S	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	1.207.000,00	PENGADAAN PRINTER	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	EPSON / L3210	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	2.850.000,00		B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	CANON / G1010	-	2023	-	-	-	-	-	Pembelian	1.725.000,00		B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.002	Lap Top	10	ACER / ASPIRE 5 AS15	-	2024	-	-	-	-	-	Pembelian	16.096.000,00	PEMEGANG AN. MOKH. SETIAWAN, SE (PENGURUS BARANG)	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.01.02.002	Lap Top	9	ACER / ASPIRE 5 AS15	-	2024	-	-	-	-	-	Pembelian	16.096.000,00	PEMEGANG AN. CAMAT SEBERANG KOTA	B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	CANON / PDMA MG2570S	-	2024	-	-	-	-	-	Pembelian	804.000,00		B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	EPSON / ECOTANK L121	-	2024	-	-	-	-	-	Pembelian	2.012.000,00		B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	EPSON / ECOTANK L121	-	2024	-	-	-	-	-	Pembelian	2.012.000,00		B	Intra	KECAMATAN SEBERANG KOTA
Jumlah Harga												2,187,564,800.00				

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Seberang Kota berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Seberang Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang disajikan dalam tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

Tabel T-C.23 menyajikan capaian Kinerja yang diperoleh Kecamatan Seberang Kota selama periode 2021 – 2024, dimana pada akhir tahun 2024 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,53 persen.

TABEL T.C 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN SEBERANG KOTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Nilai IKM Kecamatan	-	-	-	-	70.15	70.50	70.90	-	76.18	77.00	81.53	-	1.09	1.10	1.16
	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	-	-	-	2.756.293.410	3.203.820.000	3.708.100.000	4.028.650.000	2.295.061.788	1.760.615.418	1.902.905.605	1.626.283.261	0.83	0.55	0.51	0.40
	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	15.000.000	26.500.000	33.000.000	-	12.500.000	18.349.500	18.032.000	-	0.83	0.69	0.55
	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	-	-	-	2.426.344.000	2.599.320.000	2.931.800.000	3.115.150.000	2.066.407.441	1.499.485.184	1.222.791.947	1.263.291.962	-	0.58	0.42	0.41

	0.24	0.49	0.30	0.42	0.30	0.46
	0.35	0.44	3.65	0.40	0.67	0.10
0.30	0.28	0.00	0.61	0.75	0.02	
-	-	-	-	-	-	
11.000.000	142.755.300	37.024.000	102.139.999	52.040.000	13.890.000	
15.731.000	113.332.258	364.618.000	94.290.000	73.792.900	4.000.000	
12.700.000	64.380.734	-	84.822.000	86.727.500	500.000	
11.200.000	77.846.728	34.822.700	26.426.419	78.358.500	-	
45.000.000	294.000.000	125.000.000	241.000.000	175.500.000	30.000.000	
45.000.000	260.000.000	100.000.000	234.800.000	110.000.000	40.000.000	
42.000.000	227.500.000	65.000.000	140.000.000	115.000.000	30.000.000	
14.800.000	128.519.410	10.000.000	109.200.000	67.430.000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
Tingkat Disiplin Pegawai/ ASN	Cakupan layanan administrasi umum	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	Cakupan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan BMD yang dipelihara	Jumlah berita acara/ notulen kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam	

	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	30.000.000	40.000.000	30.000.000	-	500.000	4.000.000	13.890.000	-	0.02	0.10	0.46
	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	12.250.000	27.500.000	43.500.000	50.350.000	-	-	3.375.000	-	-	0.00	0.08	0.00
	Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	-	15.000.000	25.000.000	30.000.000	-	-	3.375.000	-	-	0.00	0.14	0.00
	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	-	-	-	12.250.000	12.500.000	18.500.000	20.350.000	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	-	-	-	5.650.000	127.500.000	55.000.000	70.500.000	21.990.000	1.425.000	2.000.000	7.300.000	-	0.01	0.04	0.10
	Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	5.650.000	127.500.000	55.000.000	70.500.000	12.345.000	1.425.000	2.000.000	3.650.000	-	0.01	0.04	0.05

	0.59	0.53	0.69	0.48
	0.64	0.56	0.77	0.56
1.27	22.84	0.60	0.73	
-	-	-	-	
2.138.864.600	1.218.260.800	920.603.800	3.786.337.861	
2.228.516.300	1.210.080.800	1.018.435.500	4.140.796.905	
1.701.615.810	918.648.000	782.967.810	3.464.156.228	
1.528.602.275	38.855.000	1.489.747.275	3.845.654.063	
3.652.947.500	2.312.447.500	1.340.500.000	7.832.447.500	
3.505.225.000	2.177.225.000	1.328.000.000	7.351.825.000	
1.339.225.000	40.225.000	1.299.000.000	4.728.045.000	
2.238.380.000	61.380.000	2.177.000.000	5.012.573.410	
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
Persentase desa/ kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	Jumlah program kerja kelurahan	Total	

Pada tabel TC.23 dapat diinterpretasikan hasil-hasil nilai pada masing-masing program dan capaiannya, dimana masing-masing program masih terdapat adanya kesenjangan antara 1 Program dengan Program lainnya yang terlalu jauh, seperti pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Publik dari tahun 2021-2024, terlihat hasil yang disajikan pada akhir tahun 2024 masing-masing sebesar 0,59 dan 0,00. Kurangnya kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Publik menjadi sebab, sementara pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat banyak kegiatan, seperti : PKK, MTQ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, Forkab, termasuk juga Stunting dan Kegiatan HUT Kemerdekaan RI sehingga hampir 59 persen di Kecamatan banyak terfokus pada Program ini. Belum fokusnya kegiatan yang akan direncanakan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Publik selama 4 tahun sudah sebaiknya menjadi perhatian, terutama pada saat-saat Rancangan awal Renstra ini dibuat, agar Program tersebut kedepan dapat capaian realisasinya berjalan seiring dengan Program lainnya. Ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target. Kemudian gap/kesenjangan terhadap nilai realisasi yang diberikan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga menjadi cukup perhatian, dimana masing-masing menghasilkan nilai 0,46 dan 0,10. Nilai 0,46 pada Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum baru bergerak signifikan Tahun 2024, faktor keberhasilan ini didukung oleh beberapa kegiatan-kegiatan seperti Pengawasan Pemilu dan Pembentukan FKUB. Sementara pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga baru bergerak signifikan pada Tahun 2024, persentase keberhasilan ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan Sosialisasi yang diadakan di Kantor Kecamatan Seberang Kota bekerja sama dengan Dinas PMD pada kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Diharapkan pada nilai 0,10 ini pada tahun mendatang ditingkatkan terutama pada sub-sub kegiatan yang masih belum berkontribusi didalamnya.

Dari total keseluruhan Program 2021-2024 rasio capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Seberang Kota belum dikatakan bergerak signifikan, angka 73 persen pada tahun 2021 s.d 2024 sebesar 48 persen justru mengalami penurunan, faktor ini dipengaruhi oleh adanya beberapa program yang memiliki realisasi kecil, gap yang terlalu jauh antara proses perencanaan dan penganggaran menjadi sebab, pada saat proses Renja OPD mengikuti pola alokasi Renstra yang dibuat, sementara pada proses Penganggaran dibatasi oleh Kemampuan Keuangan Daerah, Kebijakan Pemerintah Kabupaten dan faktor lainnya.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2021-2024

No.	Uraian Program Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.682.293.724	2.655.353.658	2.171.372.352	2.302.097.992	2.295.061.788	1.760.615.418	1.902.905.605	1.626.283.261	85.56	66.30	87.64	70.64	-14.17	-29.14
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	15.000.000	18.449.500	18.032.000	-	12.500.000	18.349.500	18.032.000	#DIV/0!	83.33	99	100	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.327.030.500	2.365.191.050	1.431.576.652	1.880.292.142	2.066.407.441	1.499.485.184	1.222.791.947	1.263.291.962	88.80	63.40	85.42	67.19	-19.20	-38.87
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.367.720	13.500.000	19.981.000	15.262.500	11.200.000	12.700.000	15.731.000	11.000.000	72.88	94.07	78.73	72.07	-0.68	-1.79
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.696.132	81.154.008	162.902.950	185.914.400	77.846.728	64.380.734	113.332.258	142.755.300	53.07	79.33	69.57	76.79	26.73	83.38
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.940.093	0	366.312.000	37.024.000	34.822.700	0	364.618.000	37.024.000	99.66	#DIV/0!	99.54	100	5.96	6.32
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.060.419	87.792.000	94.290.000	108.920.000	26.426.419	84.822.000	94.290.000	102.139.999	64.36	96.62	100	93.78	165.27	286.51
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.198.860	92.716.600	77.860.250	56.652.950	78.358.500	86.727.500	73.792.900	52.040.000	66.86	93.54	94.78	91.86	-51.66	-33.59
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	150.000	3.495.000	-	-	-	3.375.000	-	#DIV/0!	-	96.57	-	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	75.000	3.495.000	-	-	0	3.375.000	-	#DIV/0!	0.00	96.57	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-	75.000	-	-	-	0	-	-	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.808.274.645	1.825.760.000	2.462.887.300	2.301.391.522	1.528.602.275	1.701.615.810	2.228.516.300	2.138.864.600	84.53	93.20	90.48	92.94	27.27	39.92
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.775.000	1.042.560.000	1.231.369.800	1.230.510.800	38.855.000	918.648.000	1.210.080.800	1.218.260.800	66.11	88.11	98.27	99	1.994	3035.40
11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.749.499.645	783.200.000	1.231.517.500	1.070.880.722	1.489.747.275	782.967.810	1.018.435.500	920.603.800	85.15	99.97	82.70	85.97	-38.79	-38.20
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	1.000.000	4.000.000	13.890.000	-	500.000	4.000.000	13.890.000	#DIV/0!	50.00	100.00	100	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1.000.000	4.000.000	13.890.000	-	500.000	4.000.000	13.890.000	#DIV/0!	50	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.640.000	1.425.000	8.979.200	7.300.000	21.990.000	1.425.000	2.000.000	7.300.000	58.42	100	22.27	100	-80.61	-66.80
13	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.870.000	1.425.000	8.979.200	3.650.000	12.345.000	1.425.000	2.000.000	3.650.000	62.13	100	22.27	100	-81.63	-70.43
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.770.000	-	-	3.650.000	9.645.000	-	-	3.650.000	54.28	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	-79.46	-62.16
	Total	4.528.208.369	4.483.688.658	4.650.733.852	4.624.679.514	3.845.654.063	3.464.156.228	4.140.796.905	3.786.337.861	84.93	77.26	89.04	81.87	2.13	-1.54

Dari Tabel T.C 24 diinterpretasikan antara rasio dan realisasi program yang dapat dikatakan baik atau kurang baik, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi program memiliki gap yang kurang baik, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota rata-rata pertumbuhan anggaran -14,17 persen dengan realisasi 2021-2024 sebesar -29,14 persen, boleh dikatakan pada masing-masing Program perkembangannya melambat, seperti pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa rata-rata pertumbuhan Anggaran dan Realisasi, dimana rata-rata pertumbuhan anggaran 2021-2024 sebesar -80,61, sementara realisasi juga -66,80 persen. Apabila dilihat dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota rasio antara realisasi dan anggaran 2021-2024 juga mengalami penurunan signifikan terutama pada Tahun 2023 sebesar 87,64 persen dan pada Tahun 2024 turun menjadi 70,64 persen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, disebabkan naik turunnya jumlah anggaran yang diterima Kecamatan Seberang Kota setiap tahunnya tergantung dari alokasi yang sudah ditentukan oleh Bagian Anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Apabila dilihat dari jumlah anggaran yang diterima setiap tahunnya 2021-2024 jumlah pagu masih standar di angka 4 milyar rupiah. Namun apabila dilihat dari realisasi anggaran mengalami sedikit fluktuasi. Angka realisasi dari Tahun 2023 sebesar 4,1 milyar turun signifikan pada tahun 2024 menjadi 3,7 milyar.

Sementara pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan rata-rata pertumbuhan antara anggaran dan realisasi justru positif sebesar 27,27 persen dan 39,92 persen. Apabila dilihat dari rasio 2023-2024 sedikit mengalami peningkatan 90,48 persen menjadi 92,94 persen. Jumlah anggaran yang mengalami kenaikan dari tahun 2022 s.d 2023 sebesar 1.825.760.000 menjadi 2.462.887.300 adalah penyebab kenaikan persentase rata-rata pertumbuhan realisasi pada tahun 2024. Besarnya jumlah anggaran tersebut dipengaruhi adanya beberapa kenaikan dan penambahan anggaran, terutama pada sub kegiatan Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan pada Honorarium Da'i.

Dari keseluruhan program tersebut antara anggaran dan Realisasi tidak serta merta naik dan turun bersamaan, dengan persentase anggaran 2,13 persen dan -1,54 persen sebagai catatan disamping ada kenaikan anggaran, namun realisasi belum tentu ikut mengalami kenaikan juga, ada beberapa penyebab salah satunya yaitu pada Tahun 2024 dimana pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Dana BKBK Provinsi Jambi menyumbang alokasi anggaran yang cukup besar berpengaruh pada naiknya capaian suatu Program, namun pada kenyataannya dengan dana yang besar diberikan tersebut, tidak ada kegiatan yang direalisasikan sehingga berpengaruh pada angka rata-rata pertumbuhan realisasi 2021-2024. Jika dilihat dari total realisasi anggaran 2023 dan 2024 Kecamatan Seberang Kota mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2023 sebesar 4,1 milyar dan pada Tahun 2024 sebesar 3,7 milyar. kurang baiknya realisasi tersebut, sudah sepatutnya menjadi perhatian terutama pada program-program yang memiliki nilai realisasi kecil, karena nilai realisasi yang kecil tentunya akan berpengaruh pada pengalokasian penganggaran.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN

Kecamatan Seberang Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun tantangan dan Peluang Kecamatan Seberang Kota pada Tahun 2024-2044 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, strategi penataan ruang wilayah daerah difokuskan pada :

1. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) kegiatan dalam bentuk :
 - Pengembangan Kecamatan melalui pengembangan Sarana di Kelurahan / Desa
 - Mendorong Pertumbuhan Kecamatan dan Pengembangan Akses bagi Kelurahan/Desa tertinggal
 - Pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan Kelurahan/Desa
2. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - Pembangunan pengembangan, dan peningkatan lintas penyeberangan dalam Kabupaten
3. Perwujudan Jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan
 - Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
 - Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem
 - Saluran udara tegangan menengah (SUTM)
4. Perwujudan Sistem jaringan telekomunikasi
 - Pengembangan jaringan bergerak seluler
 - Penataan dan Pengaturan menara telekomunikasi bersama
5. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber daya air
 - Penyusunan pola dan rencana pengelolaan Sumber daya air wilayah sungai Kabupaten
 - Pengembangan pembangunan dan peningkatan dan jaringan irigasi primer
 - Program pengelolaan bangunan sumber daya air
 - Program pengelolaan sistem jaringan irigasi
 - Pengembangan, Pembangunan dan peningkatan jaringan sistem pengendalian banjir Sungai Pengabuan, Sungai Betara, Sungai Betara Kiri

- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Sungai
- Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan
- Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan daerah Pelayanan air bersih dan air minum
- Pengelolaan, pengembangan, pembangunan dan peningkatan sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air
- Program perlindungan bangunan sumber daya air

6. Perwujudan sistem pengelolaan air limbah

- Pengembangan, pembangunan, dan peningkatan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah Non domestik
- Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
- Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan Air limbah domestik dan peningkatan partisipatif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingk. Dari pencemaran.
- Penyusunan rencana kebijakan, strategis dan teknis infrastruktur sistem pengelolaan air limbah Domestik (Pembuatan master plan air limbah)
- Pembuatan Perda pengelolaan air limbah Domestik

7. Perwujudan sistem jaringan persampahan

- Pengembangan, Pembangunan dan peningkatan tempat pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Pengembangan Pembangunan, dan peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Pembuatan Master Plan Persampahan
- Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 3R (Reuse, Reduce, Recycle)
- Optimalisasi infrastruktur terpadu sebagai tempat pemilahan dan pengepresan sampah sebelum dibawa ke TPA Regional
- Sosialisasi dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/TPS-3R/TPS
- Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- Penyiapan dan pembangunan infrastruktur terpadu

8. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

- Peningkatan sign/tanda simbol jalur evakuasi bencana
- Penyusunan kajian resiko bencana alam (identifikasi lokasi, potensi ruang evakuasi dan pemetaan dan penetapan jalur evakuasi bencana)
- Penyediaan prasarana dan sarana penunjang proses evakuasi bencana
- Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana

9. Perwujudan Sistem jaringan Drainase

- Penyusunan Master Plan Drainase
- Pengembangan, pembangunan dan peningkatan jaringan drainase primer
- Pengembangan, pembangunan, dan peningkatan jaringan drainase skunder
- Pengembangan pembangunan, dan peningkatan sumur resapan
- Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase
- Peningkatan partisipatif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase
- Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah rawan genangan dari rawan banjir

10. Perwujudan pola ruang perwujudan kawasan peruntukan lindung (Perwujudan kawasan badan air)

- Operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan pantai
- Pengembangan tanggul sungai
- Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai
- Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung

11. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

- Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung diselenggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah
- Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan lindung
- Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air dalam tanah
- Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung
- Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung
- Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan hutan lindung

12. Perwujudan pengelolaan kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai)

- Pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, dan sempadan sungai
- Pengembangan sabuk hijau melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang panjang di sepanjang pantai
- Pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor
- Penertiban bangunan permukiman publik, dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal

- Rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, dan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi lindung
 - Sosialisasi penghentian alih fungsi kawasan sempadan sungai
 - Penentuan batas sempadan pantai dan sungai (pengukuran lapangan)
 - Penyusunan rencana pemanfaatan kawasan sempadan sungai
13. Perwujudan kawasan peruntukan budi daya (perwujudan kawasan hutan produksi)
- Pemantapan batas kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi terbatas
 - Revitalisasi dan rehabilitasi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
 - Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam
 - Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat
14. Perwujudan kawasan pertanian (kawasan tanaman pangan)
- Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
 - Penetapan batas KP2B
 - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
 - Peningkatan intensifikasi lahan kawasan tanaman pangan
 - Penyediaan sarana dan prasarana produksi kawasan tanaman pangan
 - Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran
 - Pengembangan agribisnis
15. Perwujudan kawasan Perkebunan
- Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan
 - Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi panen, pasca panen, dan pemasaran
 - Pengembangan sentra agropolitan

- Pengembangan sentra perkebunan
 - Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan
16. Perwujudan kawasan peruntukan industri
- Penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten (RPIK)
 - Penetapan batas kawasan peruntukan Industri
 - Penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing
 - Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri
 - Pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu
 - Pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan
17. Perwujudan kawasan pariwisata
- Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan wisata pesisir dan wisata alam
 - Pengembangan daya tarik objek wisata
 - Pengembangan dan peningkatan RTH dan / RTNH pada kawasan wisata
 - Penyusunan rencana induk pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
 - Peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata
 - Peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan
 - Pengembangan ecowisata dan wisata outdoor di sempadan sungai
18. Perwujudan kawasan permukiman (Permukiman perkotaan)
- Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
 - Pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan
 - Perbaikan lingkungan kumuh dan kurang layak huni
 - Rehabilitasi/relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
 - Konservasi kawasan tradisional /etnis/ bersejarah
 - Pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman, dan berkelanjutan
 - Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
 - Sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat
19. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan
- Penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku
 - Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
 - Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni
 - Rehabilitasi / relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
 - Penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
20. Perwujudan kawasan strategis (perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi

- Penyusunan RTR kawasan perkotaan sebagian di Kecamatan Seberang Kota
- Pengembangan dan pembangunan infrastruktur perkotaan sebagian di Kecamatan Seberang Kota
- Pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan sebagian di Kecamatan Seberang Kota
- Pengembangan tempat pelelangan ikan
- Tempat pelelangan ikan dilengkapi infrastruktur lainnya seperti pengolahan limbah cair dan padat serta sistem drainase
- Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan
- Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana nelayan

21. Perwujudan kawasan hutan lindung gambut

Selain adanya peluang-peluang tersebut, tentu tidak terlepas dari tantangan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah kedepannya, dan dianalisa dengan permasalahan internal maupun eksternal. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Tersedianya sumber daya pegawai
4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
8. Tersedianya Jaringan Informasi dan Teknologi (Internet)
9. Adanya dukungan dari Lintas Sektor Kecamatan seperti Puskesmas, Balai KB

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Kompetensi Pegawai masih cukup rendah
3. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
4. Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi.
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.

6. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

B. Lingkungan Eksternal

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Dukungan dunia usaha melalui dana CSR untuk menjalankan pelayanan publik dalam peningkatan Kinerja Kecamatan
3. Adanya Dukungan Akses Jalan dalam Mobilitas dari Ibukota Kecamatan ke Desa dan Kelurahan.
4. Jaringan Teknologi dan Informasi di Wilayah Kecamatan
5. Alokasi Anggaran untuk Kelurahan dari Pemerintah Provinsi Jambi

ANCAMAN (Threats) :

1. Kurangnya dukungan Masyarakat terhadap kegiatan Kecamatan
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah
3. Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
4. Masih bergantung pada dana anggaran yang alokasikan Pemerintah Kabupaten
5. Resiko Konflik Sosial cukup tinggi terutama permasalahan lahan
6. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
- 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
- 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
- 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
- 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)

4. Strategi W-T

Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

PERMASALAHAN, TELAAHAN, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik,

Faktor yang mempengaruhi :

- Keterbatasan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- Sistem dan prosedur kerja belum berjalan optimal, sehingga pelayanan masyarakat belum terlaksana dengan baik
- Terintegrasinya pelayanan di Dinas lain, seperti : urusan KTP, Perubahan KK, Perizinan dan sebagainya
- faktor kondisi alam menjadi sebab minimnya masyarakat yang mau berurusan, masih sulitnya akses jalan darat antara Desa satu dengan lainnya menuju ke ibukota Kecamatan, sehingga harus melalui kendaraan air, seperti pompong dan memerlukan biaya yang cukup besar untuk sampai ke Ibukota Kecamatan

2. Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum

Faktor yang mempengaruhi :

- Masih banyaknya program pembangunan yang belum terealisasi dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan, sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- Keterbatasan anggaran Kecamatan untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan OPD Tekhnis, seperti Kegiatan Sekolah Lansia Tangguh / Selatang yang ada di Kecamatan Seberang Kota

3. Keterbatasan wewenang Kecamatan dalam fungsi Pengawasan

Faktor yang mempengaruhi :

- Terbatasnya wewenang yang diberikan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan beberapa urusan, seperti konflik lahan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 adalah kondisi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai hasil dari Pembangunan yang diwujudkan sampai dengan Tahun 2029. Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

angunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Visi RPJMN tahun 2025-2029, yaitu “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh Pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju di Tahun 2045. Sedangkan Visi Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk Tahun 2025-2029 yaitu “**Mewujudkan Jambi MANTAP berdaya saing dan berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT**”. Jambi MANTAP dimaknai suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib , sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap Pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2045 sekaligus pondasi awal untuk mewujudkan Visi **Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Maju, Sejahtera, Merata, dan Berkelanjutan**. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2045 dengan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat. Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dirumuskan yaitu :

Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, adalah sebagai berikut :

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis.
 - 1) Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang **Berkualitas** ditandai dengan kinerja Pemerintahan yang baik, pengelolaan sumber daya alam yang efisiensi dan berkelanjutan,

serta mampu mengembangkan sektor ekonomi kreatif.

- 2) Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang **Ekonomi Maju** ditunjukkan dengan Pertumbuhan Ekonomi yang stabil dan tinggi, pendapatan per kapita yang besar, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingkat kemiskinan yang rendah serta berkembangnya Diversifikasi Ekonomi dengan berbagai sektor
- 3) Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang **Religius** ditandai dengan meningkatnya pemahaman, pengamalan, dan pemeliharaan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta meningkatnya semangat kebersamaan dalam masyarakat yang beriman dan bertaqwa
- 4) Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang **Kompetitif** digambarkan dengan kemampuan untuk berdaya saing secara efektif dalam berbagai bidang yang didukung dengan keunggulan kompetitif dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
- 5) Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang **Aman** ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kejahatan, keamanan terhadap bencana alam yang terkendali, dan tingkat keamanan masyarakat umum yang rendah
- 6) Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang Harmonis ditandai dengan lingkungan masyarakat yang saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan baik, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau ras dan terciptanya suasana yang kondusif untuk pembangunan.

b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat MADANi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Mandiri** dan **Berinovasi**

- 1) Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang **Mandiri** dicirikan dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat secara mandiri, dan ketergantungan pada Pemerintah Pusat semakin berkurang.
- 2) Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang **Berinovasi** ditunjukkan dengan meningkatnya penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Mewujudkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Tahun 2029. Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memperhatikan Misi (Agenda) Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Asta Cita yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,

mendorong Kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan Agro Maritim Industri di Sentra Produksi melalui peran aktif Koperasi

4. Memperkuat pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan peran Perempuan, Pemuda (Generasi Melineal dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Indonesia berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari Desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Publik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Untuk mencapai Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Daerah 2025-2029 yaitu :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari Desa ke kota yang berkelanjutan

3.3 TUJUAN DAN SASARAN

3.3.1 Tujuan dan Jangka Menengah Kecamatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah “ **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkembang dan Berinovasi.**

Tabel 3.1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Visi	Misi		Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Tahun					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI	1	Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif	1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia			73,14	74,27	75,4	76,53	77,66	78,70	
						1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,70	12,71	12,73	12,74	12,76	12,78
								Rata – rata Lama Sekolah (RLS)	8,43	8,54	8,65	8,77	8,88	9,00
						2	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Umur Harapan Hidup (tahun)	73,59	73,76	73,94	74,12	74,29	74,31
								Prevalensi Stunting	6,65	6,32	6,00	5,70	5,42	5,26
			2	Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat			70	72	74	76	78	80	
						3	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	100
						4	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial	Cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan	35	38	41	43	45	47
						5	Meningkatnya budaya inovasi dan kreativitas daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)	40,08	42,08	44,19	46,40	48,72	49,80
						6	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak	Indeks Ketimpangan Gender	0,540	0,530	0,520	0,510	0,500	0,488
								Indeks Perlindungan	63,47	63,97	64,47	64,97	65,47	66,00

						Anak								
	2	Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi		71,90	72,50	73,50	74,50	76,00	78,00		
						7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67,18	69,68	72,18	74,68	77,18	79,10
								Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	60,20	65,30	70,00	75,50	80,00	85,20
						8	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	3,53	3,76	3,80	4,00	4,25	4,55
						9	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,95	3,00	3,05	3,10	3,25	3,35
						10	Meningkatnya kualitas regulasi daerah	Indeks Reformasi Hukum	56,88	57,44	57,99	58,55	59,1	59,66
						11	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	77,5	79,00	80,30	82,00	83,50	85,00
	3	Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan	4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial		55,00 - 55,50	55,51 - 56,00	56,01 - 56,50	56,51 - 57,00	57,01 - 57,50	58,00 - 58,50		
						12	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	5,36	5,72	6,09	6,45	6,82
						13	Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80
						14	Menurunnya tingkat	Tingkat	8,37 -	7,55 -	6,63 -	5,76 -	4,89 -	4,02 -

								kemiskinan dan pengangguran	kemiskinan	9,04	8,88	7,85	7,10	6,23	6,00					
								Tingkat Penganguara n Terbuka (TPT) (%)	3,050 - 3,130	2,783 - 3,075	2,515 - 3,02	2,248 - 2,965	1,980 - 2,91	1,713 - 2,855						
															0,286	0,280	0,274	0,269	0,263	0,250
								15	Meningkatnya kesetaraan akses infrastruktur dan keuangan	Indeks infrastruktur	81,90	82,10	82,55	83,20	83,90	84,00				
										Indeks Akses Keuangan Daerah	3,08	3,13	3,17	3,22	3,28	3,35				
								16	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Indeks Desa (Rata-rata)	67,58	70,20	72,88	75,10	77,33	79,50				
								17	Meningkatnya ketahanan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,20	78,40	78,60	78,80	79,00	79,20				
										Penurunan Emisi GRK (ton CO2e)	1.450.034,51	1.535.216,38	1.620.398,26	1.705.580,13	1.790.762,00	1.875.943,87				

Tabel 3.2
Sasaran Dan Target Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045

No	Sasaran	Indikator	Target				
			Baseline (Tahun 2024)	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
1.	Mencapai Pendapatan Per Kapita Setara Dengan Kabupaten/Kota Maju	PDRB per kapita atas dasar harga konstan	154,57 juta rupiah	246,05 -258,62 juta rupiah	337,53 – 362,68 juta rupiah	429,01 – 466,74 juta rupiah	520,50 – 570,80 juta rupiah
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	15,26	22,06	28,85	35,65	42,44
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	19 %	19,50 %	20,50 %	21,00 %	25 %
2	Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan	Angka kemiskinan	9,0 %	7,00 %	5,00 %	2,00 %	0,565 %
		Indeks Gini	0,300	0,287	0,265	0,242	0,220
		Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	17,35	17	17	17	17
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36- 4,5	4,59 – 4,89	5,06 – 5,29	5,06 – 5,68	5,3 – 6,07
3	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,90	3,30	3,70	4,10	4,50
4	Meningkatnya Daya Saing Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,78	75,78	77,78	80,28	82,78
5	Menurunnya Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission	Intensitas Emisi GRK (ton CO2e)	59.589,77	56.640,12	53.690,46	50.740,81	47.791,15
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,05	74,91	76,77	78,63	80,50

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SEBERANG KOTA											
- Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat - Meningkatnya Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	81,53	85,05	85,50	86,15	88,20	89,25	90,05	
			Nilai AKIP OPD (*)	53,39	78	78,15	78,40	78,65	78,90	79	
		Meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks desa (*)	0	68,01	68,25	68,50	69,25	69,50	70,05	
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien.

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya-upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 (lima) tahun ke depan.

1. Peningkatan Akses Pendidikan Merata dan Inklusif
2. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Penguatan pendidikan karakter dan vokasi
4. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata
5. Pencegahan dan pengendalian penyakit secara promotif dan preventif
6. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak.
7. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penegak ketertiban
8. Peningkatan sinergi dan koordinasi antar instansi dalam menjaga ketertiban dan keamanan
9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
10. Peningkatan akurasi data kelompok rentan dan miskin
11. Perluasan jangkauan program bantuan sosial dan jaminan sosial
12. Penguatan ekosistem inovasi daerah
13. Fasilitasi dan insentif terhadap inovasi daerah
14. Peningkatan kapasitas SDM inovatif di sektor publik dan masyarakat
15. Pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan daerah
16. Penguatan kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan kesetaraan gender dan perlindungan anak
17. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu
18. Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja
19. Penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala dan menyeluruh
20. Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan, Penganggaran, serta Pengawasan
21. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik
22. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik

23. Pengembangan sistem layanan publik yang inklusif dan ramah kelompok rentan
24. Pengembangan dan integrasi infrastruktur teknologi informasi yang mendukung SPBE
25. Digitalisasi layanan pemerintahan yang efektif, efisien, dan user-friendly
26. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital pemerintahan
27. Penguatan perencanaan dan penyusunan peraturan daerah
28. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah
29. Peningkatan kapasitas SDM perancang peraturan
30. Penguatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
31. Pengembangan sistem manajemen SDM aparatur berbasis merit
32. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja dan pengembangan ASN
33. Penguatan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal
34. Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif
35. Pengembangan UMKM dan kewirausahaan daerah
36. Peningkatan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi
37. Pengembangan ekonomi Syariah
38. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas ekonomi lokal
39. Penguatan rantai nilai (value chain) produk unggulan daerah
40. Pengembangan inovasi produk
41. Peningkatan promosi dan perluasan pasar
42. Optimalisasi pemanfaatan platform digital
43. Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan
44. Pengembangan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan
45. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja
46. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal dan kurang berkembang
47. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi
48. Peningkatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan swasta dalam pembangunan infrastruktur
49. Perluasan akses layanan keuangan formal bagi masyarakat
50. Penguatan literasi dan inklusi keuangan
51. Fasilitasi kemitraan perbankan dan lembaga keuangan

- 
52. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa
 53. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi lokal
 54. Sinkronisasi program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional
 55. Penguatan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam
 56. Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
 57. Pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu dan berkelanjutan
 58. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian lingkungan

3.4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman strategis yang menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode perencanaan jangka menengah 2025–2045. Penyusunan arah kebijakan ini berorientasi pada pencapaian visi dan misi daerah, serta selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi. Kebijakan-kebijakan ini dirancang secara terukur, inklusif, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan potensi dan tantangan daerah, dinamika global, serta aspirasi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah disusun untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan kondisi aman, tenteram, dan tertib, memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Berikut arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan RPJMD

No.	Misi	Arah Kebijakan	Ket.
1	2	3	4
Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI			
1	Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif	• Perluasan akses pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau dan berkualitas • Penyediaan pendidikan bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus • Peningkatan ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik • Penguatan program bantuan pendidikan bagi keluarga miskin • Pemanfaatan teknologi • Penguatan kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat • Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan • Penguatan sistem pembinaan dan evaluasi kinerja guru serta tenaga kependidikan • Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan	

		• Pemerataan distribusi pendidik yang berkualitas • Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan profesional pendidik • Integrasi pendidikan karakter dalam seluruh jenjang dan mata pelajaran • Mendorong penguatan dan revitalisasi pendidikan vokasi dan keterampilan kerja pada jenjang pendidikan menengah atas /kejuruan • Mendorong peningkatan kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) pada jenjang pendidikan menengah atas / kejuruan • Peningkatan kapasitas dan status kelembagaan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas • Perluasan jangkauan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan Optimalisasi fungsi Puskesmas dan Pustu sebagai pusat layanan kesehatan dasar • Peningkatan cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) • Peningkatan edukasi dan literasi kesehatan masyarakat • Penguatan layanan promotif dan preventif di fasilitas kesehatan • Deteksi dini dan surveilans penyakit menular dan tidak menular • Peningkatan cakupan imunisasi dan intervensi gizi spesifik • Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan nifas • Peningkatan pelayanan neonatal, bayi, dan balita • Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan KIA • Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pelayanan KIA • Peningkatan kompetensi dan	
--	--	---	--

		profesionalisme aparaturnegak ketertiban (Satpol PP dan Satlinmas) • Penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai • Penguatan kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas • Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum • Pengembangan sistem informasi terpadu untuk pelaporan dan pemantauan ketertiban • Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum • Pelibatan aktif tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan dalam pembinaan keamanan lingkungan • Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala dan partisipatif • Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan data kemiskinan dan kerentanan sosial • Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan analisis data kesejahteraan sosial • Peningkatan kapasitas aparaturnegak dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sosial • Peningkatan cakupan penerima manfaat program bantuan sosial daerah dan pusat • Pengembangan skema bantuan sosial berbasis kebutuhan lokal • Peningkatan kolaborasi multipihak (pentahelix) • Pembentukan dan penguatan kelembagaan inovasi daerah • Peningkatan peran pemerintah daerah sebagai enabler dan fasilitator inovasi • Pemberian penghargaan (award) terhadap inovasi sektor publik dan masyarakat • Penyediaan skema pendanaan dan bantuan teknis untuk pengembangan inovasi	
--	--	---	--

		• Fasilitasi hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk inovasi lokal • Peningkatan literasi inovasi dan teknologi bagi ASN dan masyarakat • Fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi inovatif • Pembentukan dan penguatan komunitas inovator lokal • Integrasi isu gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah • Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di daerah • Peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah dalam perspektif gender • Penguatan peran dan fungsi kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan Perlindungan Anak • Pembentukan dan optimalisasi forum koordinasi lintas sektor • Penguatan regulasi dan kebijakan daerah pendukung kelembagaan • Peningkatan sistem pelaporan dan pengaduan kekerasan yang mudah diakses dan responsif • Penguatan layanan terpadu bagi korban kekerasan • Peningkatan kampanye dan edukasi publik tentang pencegahan kekerasan	
2	Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	• Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja • Peningkatan kualitas penyusunan indikator kinerja dan perjanjian kinerja • Penguatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) • Penerapan sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi • Penguatan peran Bappeda dan Inspektorat dalam perencanaan dan pengawasan kinerja • Peningkatan kapasitas dan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) • Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD secara sistematis dan terstruktur • Pengembangan sistem monitoring dan	

		evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi • Peningkatan kompetensi ASN di bidang perencanaan, penganggaran, dan pengawasan • Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan • Peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN bidang pelayanan publik • Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif • Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik • Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik • Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan • Peningkatan ketersediaan jaringan internet yang andal dan merata • Penguatan sistem keamanan informasi dan perlindungan data pemerintah • Penyediaan perangkat keras dan lunak penunjang layanan digital • Penyederhanaan proses bisnis layanan pemerintahan melalui digitalisasi • Pengembangan aplikasi layanan publik dan administrasi pemerintahan yang terintegrasi • Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan dan sertifikasi bidang teknologi informasi • Penyusunan program legislasi daerah (Prolegda) yang terencana dan terukur • Peningkatan koordinasi antar-OPD dan DPRD • Pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) • Penyelarasan regulasi daerah • Integrasi regulasi lintas sektor dan wilayah • Penyelenggaraan pelatihan teknis dan	
--	--	--	--

		substantif • Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi perancangan peraturan • Pengembangan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan kompetensi jabatan • Peningkatan akses dan kualitas pelatihan ASN melalui sistem digital learning • Penerapan sistem rekrutmen dan promosi ASN yang objektif dan transparan • Penguatan perencanaan kebutuhan ASN yang tepat dan berbasis data • Pengembangan sistem penilaian kinerja yang terukur dan akuntabel • Penguatan sistem pengembangan karier dan pola mutasi ASN • Peningkatan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) yang terintegrasi • Digitalisasi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja ASN	
3	Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan	• Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan • Pengembangan hilirisasi dan rantai nilai (value chain) produk unggulan • Peningkatan akses pasar dan promosi produk lokal • Penyederhanaan dan percepatan perizinan usaha • Peningkatan promosi dan fasilitasi investasi daerah • Peningkatan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor • Fasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih • Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan UMKM • Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM dan wirausaha • Digitalisasi dan modernisasi UMKM • Penguatan promosi dan akses pasar UMKM • Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur konektivitas wilayah • enyediaan infrastruktur dasar untuk kawasan ekonomi dan industri	

		• Peningkatan infrastruktur logistik dan rantai pasok • Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas Layanan Keuangan Syariah • Pengembangan Industri Produk Halal • Peningkatan Literasi dan Edukasi Ekonomi Syariah • Sinergi Kebijakan dan Regulasi Pusat-Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah • Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional • Pengembangan sertifikasi kompetensi tenaga kerja • Peningkatan akses informasi pasar kerja dan kesempatan kerja • Mendorong inovasi dan adopsi teknologi dalam proses produksi • Peningkatan kualitas produksi hulu • Pengembangan industri pengolahan • Fasilitasi sertifikasi mutu, keamanan, dan legalitas • Riset dan pengembangan (R&D) berbasis potensi lokal • Pemanfaatan teknologi tepat guna • Inkubasi bisnis dan start-up lokal • Peningkatan kegiatan promosi produk unggulan daerah • Pemanfaatan platform digital dan e-commerce • Penguatan branding daerah • Fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk • Menyediakan infrastruktur pendukung • Memfasilitasi pelatihan literasi digital bagi pelaku usaha, masyarakat, dan aparat desa/kelurahan • Pemutakhiran dan integrasi data kemiskinan secara berkala dan akurat • Peningkatan koordinasi program bantuan sosial lintas sektor dan level pemerintahan • Peningkatan akses pelatihan kerja dan keterampilan berbasis kebutuhan pasar • Perluasan program padat karya dan pemberdayaan ekonomi lokal • Peningkatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam penyediaan	
--	--	---	--

		lapangan kerja • Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi kerja • Pembangunan dan peningkatan akses jalan, jembatan, dan transportasi antar wilayah • Peningkatan akses layanan air bersih dan sanitasi layak di 13 kecamatan • Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antar desa, kecamatan, dan kabupaten • Penguatan kerja sama antarwilayah dan dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur konektivitas • Penguatan sinergi program pembangunan antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat • Optimalisasi peran dunia usaha dalam pembangunan daerah • Mendorong pembukaan kantor cabang, unit layanan, atau agen bank di wilayah yang belum terjangkau • Mengembangkan layanan keuangan berbasis digital dan mobile banking untuk mempermudah akses masyarakat. • Mengadakan kampanye inklusi keuangan melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas • Mengoptimalkan peran perbankan, dan lembaga keuangan lainnya dalam program literasi keuangan daerah • Menyusun program kredit/pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan karakteristik usaha daerah. • Mendorong perbankan dan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan inklusif, termasuk kredit tanpa agunan untuk usaha mikro • Mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha daerah dengan lembaga keuangan berbasis syariah untuk mendukung ekonomi halal. • Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan • Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan,	
--	--	---	--

		akuntabel, dan partisipatif • Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa • Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi desa • Penguatan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dan BUMDesma • Penyelarasan prioritas pembangunan desa dengan RPJMD kabupaten/kota, RPJMN, dan SDGs Desa • Penyusunan dan pendampingan dokumen perencanaan dan penganggaran desa berbasis regulasi nasional dan daerah • Peningkatan perlindungan kawasan hutan, lahan basah, pesisir, dan ekosistem penting lainnya • Pengembangan kebijakan konservasi berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat • Penguatan sistem peringatan dini dan pengelolaan risiko bencana iklim • Penerapan praktik pertanian, perikanan, dan kehutanan berkelanjutan berbasis adaptasi iklim • Peningkatan kapasitas infrastruktur dan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah • Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan sampah dan limbah • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan lingkungan • Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan • Pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan (KMPPL), sekolah Adiwiyata, dan komunitas lokal	
--	--	--	--

3.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Seberang Kota

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Seberang Kota menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Seberang Kota. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Seberang Kota selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Seberang Kota.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Seberang Kota untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5

Tujuan, sasaran, strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani			
Misi 1 : Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan peran kelembagaan dan forum kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.	Fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Linmas di tingkat desa/kelurahan.
		Peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam deteksi dini, mediasi konflik, dan penanganan gangguan ketertiban.	Pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, hidup rukun, dan penyelesaian konflik secara damai.
		Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pembinaan kehidupan sosial yang rukun dan aman.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang keamanan lingkungan, seperti pos ronda, lampu jalan
		Pengembangan sistem informasi dan pengawasan sosial berbasis komunitas dan digital.	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program Siskamling dan pelaporan gangguan ketertiban.

			Koordinasi terpadu dengan TNI/Polri, Satpol PP, dan perangkat daerah dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum).
Misi 2 : Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik	• Peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN bidang pelayanan publik • Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.
		Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik	• Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan publik berbasis elektronik • Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik

Misi 3 : Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa	• Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan • Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif • Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa • Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.
		Sinkronisasi program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional	• Penyelarasan prioritas pembangunan desa dengan RPJMD kabupaten/kota, RPJMN, dan SDGs Desa • Penyusunan dan pendampingan dokumen perencanaan dan penganggaran desa berbasis regulasi nasional dan daerah • Peningkatan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital • Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik

Tabel 3.6
Prioritas Pembangunan

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Pemetaan potensi konflik sosial berbasis data wilayah dan kelompok masyarakat;	Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan anti-radikalisme;	Fasilitasi kegiatan sosial lintas agama seperti bakti sosial dan gotong royong bersama;	Optimalisasi peran Satpol PP, Satlinmas, dan forum-forum keamanan warga;	Penghargaan kepada tokoh dan komunitas pelopor kerukunan
Fasilitasi penyediaan data keluarga beresiko stunting.	Pemberdayaan desa dan alokasi dana desa untuk penanganan stunting.	Inisiasi program ketahanan pangan keluarga untuk mendukung gizi anak.		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Untuk mewujudkan visi “Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani” (Berdaya saing, *(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)* dan *(Mandiri dan Inovatif)*) telah dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang merupakan aspek strategis. Dalam operasionalnya dijalankan dalam bentuk program sebagai upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan serta sub kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Seberang Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030 disampaikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN SEBERANG KOTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD	
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	(Rp. 000)
1	2	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor		100%	100%	100%	3.748.920.000	100%	4.023.002.000	100%	4.546.650.000	100%	4.993.085.000	100%	5.267.093.500	100%	25.712.894.500
			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan		100%	24.500.000	100%	24.800.000	100%	26.500.000	100%	33.000.000	100%	38.000.000	100%	42.000.000	100%	188.800.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	9.500.000	14 Laporan	9.800.000	7 Dokumen	10.000.000	7 Dokumen	15.000.000	7 Dokumen	18.000.000	7 Dokumen	20.000.000	7 Dokumen	82.300.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14 Laporan	15.000.000	14 Laporan	15.000.000	14 Laporan	16.500.000	14 Laporan	18.000.000	14 Laporan	20.000.000	14 Laporan	22.000.000	14 Laporan	106.500.000

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD		100%	2.426.344.000	100%	2.692.420.000	100%	2.834.502.000	100%	3.115.150.000	100%	3.425.085.000	100%	3.524.093.500	100%	18.017.594.500
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	2.338.564.000	22 Orang/Bulan	2.572.420.000	22 Orang/Bulan	2.704.502.000	24 Orang/Bulan	2.980.150.000	26 Orang/Bulan	3.285.085.000	26 Orang/Bulan	3.374.093.500	26 Orang/Bulan	17.254.814.500
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	87.780.000	12 Dokumen	120.000.000	12 Dokumen	130.000.000	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	140.000.000	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	762.780.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN		100%	34.800.000	100%	44.700.000	100%	66.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	370.500.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		37	14.800.000	38 Paket	24.700.000	37 Paket	46.000.000	38 Paket	50.000.000	38 Paket	55.000.000	38 Paket	60.000.000	38 Paket	250.500.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2	20.000.000	4 Orang	20.000.000	4 orang	20.000.000	4 orang	20.000.000	4 orang	20.000.000	4 orang	20.000.000	4 orang	120.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum		100%	137.500.000	100%	253.000.000	100%	300.000.000	100%	368.500.000	100%	438.000.000	100%	529.000.000	100%	2.026.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		12	2.500.000	12 Paket	3.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.500.000	12 Paket	6.000.000	12 Paket	8.000.000	12 Paket	30.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12	20.000.000	12 Paket	22.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	60.000.000	12 Paket	227.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan		12	24.000.000	12 paket	30.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	45.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	70.000.000	12 Paket	254.000.000

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		12	13.000.000	12 paket	14.000.000	12 paket	15.000.000	12 paket	16.000.000	12 paket	18.000.000	12 paket	25.000.000	12 paket	101.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		12	8.000.000	12 Dokumen	9.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	12.000.000	12 Dokumen	14.000.000	12 Dokumen	16.000.000	12 Dokumen	69.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	70.000.000	12 laporan	175.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	1.345.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD		100%	295.000.000	100%	447.000.000	100%	413.000.000	100%	480.000.000	100%	490.000.000	100%	519.000.000	100%	2.644.000.000
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		5	250.000.000	5 unit	380.000.000	5 unit	340.000.000	5 unit	400.000.000	5 unit	405.000.000	5 unit	425.000.000	5 unit	2.200.000.000
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		4	35.000.000	4 Paket	37.000.000	4 Paket	38.000.000	4 Paket	40.000.000	4 Paket	40.000.000	4 Paket	44.000.000	4 Paket	234.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		5	10.000.000	5 unit	30.000.000	5 unit	35.000.000	5 unit	40.000.000	5 Unit	45.000.000	5 unit	50.000.000	5 unit	210.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	132.000.000	100%	185.000.000	100%	243.000.000	100%	270.000.000	100%	282.000.000	100%	303.000.000	100%	1.415.000.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	2.000.000	12 laporan	3.000.000	12 laporan	4.000.000	12 laporan	5.000.000	12 laporan	7.000.000	12 laporan	8.000.000	12 laporan	29.000.000

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12	30.000.000	12 laporan	32.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	40.000.000	12 laporan	45.000.000	12 laporan	55.000.000	12 laporan	237.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12	100.000.000	12 laporan	150.000.000	12 Laporan	204.000.000	12 Laporan	225.000.000	12 Laporan	230.000.000	12 Laporan	240.000.000	12 laporan	1.149.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara		100%	84.000.000	100%	102.000.000	100%	140.000.000	100%	210.000.000	100%	245.000.000	100%	270.000.000	100%	1.051.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		14	70.000.000	20 unit	80.000.000	20 unit	90.000.000	20 unit	120.000.000	20 unit	140.000.000	20 unit	150.000.000	20 unit	650.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara		4	4.000.000	4 unit	7.000.000	4 unit	10.000.000	4 unit	15.000.000	4 unit	25.000.000	4 unit	30.000.000	4 unit	91.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2	10.000.000	2 unit	15.000.000	2 unit	40.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	80.000.000	2 unit	90.000.000	2 unit	310.000.000
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	07.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85.05 Mutu Pelayanan	30.000.000	85.50 Mutu Pelayanan	36.000.000	86.15 Mutu Pelayanan	50.000.000	88.20 Mutu Pelayanan	60.000.000	89.25 Mutu Pelayanan	68.000.000	90.05 Mutu pelayanan	75.000.000	90	319.000.000

		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Rapat Koordinasi		3	15.000.000	3 Kali	16.000.000	3 Kali	25.000.000	3 Kali	30.000.000	3 Kali	33.000.000	3 Kali	35.000.000	3 kali	154.000.000
		'07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		3	15.000.000	3 laporan	16.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	33.000.000	3 Laporan	35.000.000	3 Laporan	154.000.000
		07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan		12	15.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	165.000.000
		02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan		12	15.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	35.000.000	12 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	165.000.000
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	07.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Rata-rata Indeks Desa		68,01	3.780.000.000	68,25	4.561.000.000	68,50	4.698.000.000	69,25	4.912.000.000	69,50	5.158.000.000	70,05	5.376.000.000	70,10	28.485.000.000
		07.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa		10 Kegiatan	1.480.000.000	10 Kegiatan	2.241.000.000	10 Kegiatan	2.348.000.000	10 Kegiatan	2.452.000.000	10 Kegiatan	2.558.000.000	10 Kegiatan	2.666.000.000	10 Kegiatan	13.745.000.000
		01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		1	25.000.000	1 Laporan	26.000.000	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	33.000.000	1 Laporan	36.000.000	1 Laporan	178.000.000

		02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		12	5.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	22.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	117.000.000
		03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		8	1.450.000.000	8 Laporan	2.200.000.000	8 laporan	2.300.000.000	8 laporan	2.400.000.000	8 laporan	2.500.000.000	8 Laporan	2.600.000.000	8 Laporan	13.450.000.000
		07.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Program Kerja Kelurahan		2	2.300.000.000	2 Kegiatan	2.320.000.000	2 Kegiatan	2.350.000.000	2 Kegiatan	2.460.000.000	2 Kegiatan	2.600.000.000	2 Kegiatan	2.710.000.000	2 Kegiatan	14.740.000.000
		02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		5	1.200.000.000	5 unit	1.220.000.000	5 unit	1.230.000.000	5 unit	1.240.000.000	5 unit	1.250.000.000	5 unit	1.260.000.000	5 unit	7.400.000.000
		03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10	1.100.000.000	10 Pokmas	1.100.000.000	10 Pokmas	1.120.000.000	10 Pokmas	1.220.000.000	10 Pokmas	1.350.000.000	10 Pokmas	1.450.000.000	10 Pokmas	7.340.000.000
Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	07.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya efektivitas koordinasi penegakan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	-	2	25.000.000	2	20.000.000	2	24.000.000	2	30.000.000	2	33.000.000	2	40.000.000	2	172.000.000
		07.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban		2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	24.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	33.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	172.000.000

		01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Lapora n	10.000.000	1 Laporan	10.000.00 0	1 Lapora n	12.000.00 0	1 Lapora n	15.000.000	1 Lapora n	16.500.000	1 Lapora n	20.000.000	1 Lapora n	83.500.000
		02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 Lapora n	15.000.000	1 Laporan	10.000.00 0	1 Lapora n	12.000.00 0	1 Lapora n	15.000.000	1 Lapora n	16.500.000	1 Lapora n	20.000.000	1 Lapora n	88.500.000
Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	07.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu		100%	44.000.000	100%	59.000.00 0	100%	95.000.00 0	100%	108.000.000	100%	116.800.000	100%	150.000.000	100%	572.800.000
		07.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan Desa		8 Desa/K el	44.000.000	8 Desa/Kel	59.000.00 0	8 Desa/K el	95.000.00 0	8 Desa/K el	108.000.000	8 Desa/K el	116.800.000	8 Desa/K el	150.000.000	8 Desa/K el	572.800.000
		02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemeritnahan Desa		8 Desa/K el	7.000.000	8 Desa/Kel	10.000.00 0	8 Desa/K el	15.000.00 0	8 Desa/K el	17.000.000	8 Desa/K el	18.700.000	8 Desa/K el	25.000.000	8 Desa/K el	92.700.000
		03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		8 Desa/K el	8.000.000	8 Desa/Kel	10.000.00 0	8 Desa/K el	15.000.00 0	8 Desa/K el	17.000.000	8 Desa/K el	18.700.000	8 Desa/K el	25.000.000	8 Desa/K el	93.700.000

		06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		8 Desa/Kel	12.000.000	8 Desa/Kel	20.000.000	8 Desa/Kel	35.000.000	8 Desa/Kel	40.000.000	8 Desa/Kel	42.000.000	8 Desa/Kel	45.000.000	8 Desa/Kel	194.000.000
		15.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		8 Desa/Kel	8.000.000	8 Desa/Kel	9.000.000	8 Desa/Kel	15.000.000	8 Desa/Kel	17.000.000	8 Desa/Kel	18.700.000	8 Desa/Kel	30.000.000	8 Desa/Kel	97.700.000
		16.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		8 Desa/Kel	9.000.000	8 Desa/Kel	10.000.000	8 Desa/Kel	15.000.000	8 Desa/Kel	17.000.000	8 Desa/Kel	18.700.000	8 Desa/Kel	25.000.000	8 Desa/Kel	94.700.000
								3.879.000.001		8.424.920.000		8.890.002.000		9.656.650.000		10.368.885.000		10.908.093.500		55.261.694.500

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH															
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT															
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01 - KECAMATAN					8.424.920.000,00		8.890.002.000,00		9.656.650.000,00		10.368.885.000,00		10.908.093.500,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.748.920.000,00		4.023.002.000,00		4.546.650.000,00		4.993.085.000,00		5.267.093.500,00		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100	3.748.920.000,00	100	4.023.002.000,00	100	4.546.650.000,00	100	4.993.085.000,00	100	5.267.093.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					36.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		68.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	81,53	85,05	85,50	36.000.000,00	86,15	50.000.000,00	88,20	60.000.000,00	89,25	68.000.000,00	90,05	75.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.561.000.000,00		4.698.000.000,00		4.912.000.000,00		5.158.000.000,00		5.376.000.000,00	
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal	Rata-rata indeks desa (*)	0	68,01	68,25	4.561.000.000,00	68,50	4.698.000.000,00	69,25	4.912.000.000,00	69,50	5.158.000.000,00	70,05	5.376.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					20.000.000,00		24.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Penegakan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	24.000.000,00	100	30.000.000,00	100	33.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					59.000.000,00		95.000.000,00		108.000.000,00		116.800.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu (%)	100	100	100	59.000.000,00	100	95.000.000,00	100	108.000.000,00	100	116.800.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					8.424.920.000.00		8.890.002.000.00		9.656.650.000.00		10.368.885.000.00		10.908.093.500.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN							
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD							
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SEBERANG KOTA							
- Meningkatnya Kemandirian Desa Secara Berkelanjutan - Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat - Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Terwujudnya Penyenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
					Nilai AKIP OPD (*)		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tingkat Pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

				Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Tertaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Tertaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
		Meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan			Rata-rata indeks desa (*)		
			Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal		Rata-rata indeks desa (*)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Tertaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tertindakannya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa		Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tertindakannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	

				Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

					(Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)		
			Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Penegakan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH															
KECAMATAN SEBERANG KOTA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT															
Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kecamatan															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,53 Mutu Layanan	85,05 Mutu Layanan	30.000.000	85,50 Mutu Layanan	36.000.000	86,15 Mutu Layanan	50.000.000	88,20 Mutu Layanan	60.000.000	89,25 Mutu Layanan	68.000.000	90,05 Mutu Layanan	75.000.000	Kec. Seberang Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.	Rata2 Indeks Desa	-	68,01	3.780.000.000	68,25	4.561.000.000	68,50	4.698.000.000	69,25	4.912.000.000	69,50	5.158.000.000	70,05	5.376.000.000	Kec. Seberang Kota
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Meningkatnya efektivitas koordinasi penegakan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	25.000.000	100%	20.000.000	100%	24.000.000	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	40.000.000	Kec. Seberang Kota
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	44.000.000	100%	59.000.000	100%	95.000.000	100%	108.000.000	100%	116.800.000	100%	150.000.000	Kec. Seberang Kota

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaanya kinerja Kecamatan Seberang Kota berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN																	
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT																	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
7.01 - KECAMATAN					8.424.920.000,00		8.890.002.000,00		9.656.650.000,00		10.368.885.000,00		10.908.093.500,00				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.748.920.000,00		4.023.002.000,00		4.546.650.000,00		4.993.085.000,00		5.267.093.500,00				
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100	3.748.920.000,00	100	4.023.002.000,00	100	4.546.650.000,00	100	4.993.085.000,00	100	5.267.093.500,00	7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - KECAMATAN SEBERANG KOTA			
	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100		100		100		100		100					
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24.800.000,00		26.500.000,00		33.000.000,00		38.000.000,00		42.000.000,00				
Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	7	24.800.000,00	7	26.500.000,00	7	33.000.000,00	7	38.000.000,00	7	42.000.000,00				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	14	14		14		14		14		14					

7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.800.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		Seberang Kota	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	7	9.800.000,00	7	10.000.000,00	7	15.000.000,00	7	18.000.000,00	7	20.000.000,00			
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15.000.000,00		16.500.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		Seberang Kota	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	14	14	15.000.000,00	14	16.500.000,00	14	18.000.000,00	14	20.000.000,00	14	22.000.000,00			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.692.420.000,00		2.834.502.000,00		3.115.150.000,00		3.425.085.000,00		3.524.093.500,00			
Tingkat Pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	2.692.420.000,00	12	2.834.502.000,00	12	3.115.150.000,00	12	3.425.085.000,00	12	3.524.093.500,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	10	12	22		22		24		26		26				
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.572.420.000,00		2.704.502.000,00		2.980.150.000,00		3.285.085.000,00		3.374.093.500,00		Seberang Kota	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	10	12	22	2.572.420.000,00	22	2.704.502.000,00	24	2.980.150.000,00	26	3.285.085.000,00	26	3.374.093.500,00			

	Tunjangan ASN (Orang/bulan)															
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					120.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		Seberang Kota	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00	12	135.000.000,00	12	140.000.000,00	12	150.000.000,00			
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					44.700.000,00		66.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00			
Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	4	4	44.700.000,00	4	66.000.000,00	4	70.000.000,00	4	75.000.000,00	4	80.000.000,00			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	38	37	38		37		38		38		38				
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					24.700.000,00		46.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		Seberang Kota	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	38	37	38	24.700.000,00	37	46.000.000,00	38	50.000.000,00	38	55.000.000,00	38	60.000.000,00			
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00			

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					253.000.000,00		300.000.000,00		368.500.000,00		438.000.000,00		529.000.000,00			
Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	253.000.000,00	12	300.000.000,00	12	368.500.000,00	12	438.000.000,00	12	529.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12				
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		Seberang Kota	

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	3.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.500.000,00	12	6.000.000,00	12	8.000.000,00			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					22.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		Seberang Kota	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	22.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.000.000,00	12	50.000.000,00	12	60.000.000,00			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					30.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		Seberang Kota	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	45.000.000,00	12	50.000.000,00	12	70.000.000,00			
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		25.000.000,00		Seberang Kota	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	14.000.000,00	12	15.000.000,00	12	16.000.000,00	12	18.000.000,00	12	25.000.000,00			
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					9.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		Seberang Kota	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	9.000.000,00	12	10.000.000,00	12	12.000.000,00	12	14.000.000,00	12	16.000.000,00			
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat					175.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		Seberang Kota	

Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	175.000.000,00	12	200.000.000,00	12	250.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					447.000.000,00		413.000.000,00		480.000.000,00		490.000.000,00		519.000.000,00			
Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	4	447.000.000,00	4	413.000.000,00	4	480.000.000,00	4	490.000.000,00	4	519.000.000,00			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5	5		5		5		5		5				
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					380.000.000,00		340.000.000,00		400.000.000,00		405.000.000,00		425.000.000,00		Seberang Kota	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5	5	5	380.000.000,00	5	340.000.000,00	5	400.000.000,00	5	405.000.000,00	5	425.000.000,00			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					37.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		44.000.000,00		Seberang Kota	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	4	37.000.000,00	4	38.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	44.000.000,00			
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan					30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		Seberang Kota	

Mesin Lainnya																
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5	5	30.000.000,00	5	35.000.000,00	5	40.000.000,00	5	45.000.000,00	5	50.000.000,00			
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.000.000,00		243.000.000,00		270.000.000,00		282.000.000,00		303.000.000,00			
Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	185.000.000,00	12	243.000.000,00	12	270.000.000,00	12	282.000.000,00	12	303.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		Seberang Kota	
Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	3.000.000,00	12	4.000.000,00	12	5.000.000,00	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					32.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		Seberang Kota	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	32.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.000.000,00	12	45.000.000,00	12	55.000.000,00			
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan					150.000.000,00		204.000.000,00		225.000.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00		Seberang Kota	

Umum Kantor																
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	150.000.000,00	12	204.000.000,00	12	225.000.000,00	12	230.000.000,00	12	240.000.000,00			
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102.000.000,00		140.000.000,00		210.000.000,00		245.000.000,00		270.000.000,00			
Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2	102.000.000,00	2	140.000.000,00	2	210.000.000,00	2	245.000.000,00	2	270.000.000,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	14	20		20		20		20		20				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	4	4		4		4		4		4				
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					80.000.000,00		90.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		Seberang Kota	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	14	20	80.000.000,00	20	90.000.000,00	20	120.000.000,00	20	140.000.000,00	20	150.000.000,00			

7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		Muaraseberang	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	4	4	7.000.000,00	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00			
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.000.000,00		40.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2	15.000.000,00	2	40.000.000,00	2	75.000.000,00	2	80.000.000,00	2	90.000.000,00			
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					36.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		68.000.000,00		75.000.000,00			
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)	81,53	85,05	85,50	36.000.000,00	86,15	50.000.000,00	88,20	60.000.000,00	89,25	68.000.000,00	90,05	75.000.000,00	7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - KECAMATAN SEBERANG KOTA		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					16.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	3	3	16.000.000,00	3	25.000.000,00	3	30.000.000,00	3	33.000.000,00	3	35.000.000,00			

7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					16.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	3	3	16.000.000,00	3	25.000.000,00	3	30.000.000,00	3	33.000.000,00	3	35.000.000,00			
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00			
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	12	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.000.000,00			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	12	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.000.000,00			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.561.000.000,00		4.698.000.000,00		4.912.000.000,00		5.158.000.000,00		5.376.000.000,00			
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis	Rata-rata indeks desa (*)	0	68,01	68,25	4.561.000.000,00	68,50	4.698.000.000,00	69,25	4.912.000.000,00	69,50	5.158.000.000,00	70,05	5.376.000.000,00	7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - KECAMATAN		

potensi lokal														SEBERANG KOTA		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					2.241.000.000,00		2.348.000.000,00		2.452.000.000,00		2.558.000.000,00		2.666.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	8	8	2.241.000.000,00	8	2.348.000.000,00	8	2.452.000.000,00	8	2.558.000.000,00	8	2.666.000.000,00			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	0	12	12		12		12		12		12				
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					26.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.000.000,00		Seberang Kota	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	1	1	1	26.000.000,00	1	28.000.000,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.000.000,00			

	Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)															
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					15.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	0	12	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2.200.000.000,00		2.300.000.000,00		2.400.000.000,00		2.500.000.000,00		2.600.000.000,00		Seberang Kota	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	8	8	2.200.000.000,00	8	2.300.000.000,00	8	2.400.000.000,00	8	2.500.000.000,00	8	2.600.000.000,00			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					2.320.000.000,00		2.350.000.000,00		2.460.000.000,00		2.600.000.000,00		2.710.000.000,00			
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5	5	5	2.320.000.000,00	5	2.350.000.000,00	5	2.460.000.000,00	5	2.600.000.000,00	5	2.710.000.000,00			

	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	10	10		10		10		10		10				
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					1.220.000.000,00		1.230.000.000,00		1.240.000.000,00		1.250.000.000,00		1.260.000.000,00		Seberang Kota	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5	5	5	1.220.000.000,00	5	1.230.000.000,00	5	1.240.000.000,00	5	1.250.000.000,00	5	1.260.000.000,00			
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.100.000.000,00		1.120.000.000,00		1.220.000.000,00		1.350.000.000,00		1.450.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	10	10	10	1.100.000.000,00	10	1.120.000.000,00	10	1.220.000.000,00	10	1.350.000.000,00	10	1.450.000.000,00			
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					20.000.000,00		24.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		40.000.000,00			
Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Penegakan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	24.000.000,00	100	30.000.000,00	100	33.000.000,00	100	40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - KECAMATAN SEBERANG KOTA		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					20.000.000,00		24.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		40.000.000,00			

Meningkatnya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1	20.000.000,00	1	24.000.000,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	40.000.000,00			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	1	1		1		1		1		1				
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00		20.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	20.000.000,00			
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00		20.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama	0	1	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	20.000.000,00			

	dan Tokoh Masyarakat (Laporan)															
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					59.000.000,00		95.000.000,00		108.000.000,00		116.800.000,00		150.000.000,00			
Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu (%)	100	100	100	59.000.000,00	100	95.000.000,00	100	108.000.000,00	100	116.800.000,00	100	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - KECAMATAN SEBERANG KOTA		
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					59.000.000,00		95.000.000,00		108.000.000,00		116.800.000,00		150.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendai dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	8	8	8	59.000.000,00	8	95.000.000,00	8	108.000.000,00	8	116.800.000,00	8	150.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	8	8		8		8		8		8				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8	8	8		8		8		8		8				

	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	0	8	8		8		8		8		8				
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	8	8		8		8		8		8				
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					10.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		18.700.000,00		25.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	8	8	8	10.000.000,00	8	15.000.000,00	8	17.000.000,00	8	18.700.000,00	8	25.000.000,00			
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					10.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		18.700.000,00		25.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8	8	8	10.000.000,00	8	15.000.000,00	8	17.000.000,00	8	18.700.000,00	8	25.000.000,00			
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					20.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		42.000.000,00		45.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	8	8	20.000.000,00	8	35.000.000,00	8	40.000.000,00	8	42.000.000,00	8	45.000.000,00			

7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					9.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		18.700.000,00		30.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	8	8	9.000.000,00	8	15.000.000,00	8	17.000.000,00	8	18.700.000,00	8	30.000.000,00			
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					10.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		18.700.000,00		25.000.000,00		Seberang Kota	
Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	0	8	8	10.000.000,00	8	15.000.000,00	8	17.000.000,00	8	18.700.000,00	8	25.000.000,00			

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS				
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA				
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT				
NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SEBERANG KOTA				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	

Tabel 4.4
 IKK KECAMATAN KECAMATAN SEBERANG KOTA
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
Tingkat partisipasi masyarakat dalam survei IKM	Persen	100	100	100	100	100	100
Jumlah sarana pelayanan publik	Unit	2	2	2	2	2	2
Persentase Jumlah kelompok sasaran miskin/stunting yang mendapatkan manfaat langsung dari fasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100
Terdatanya sarana / prasarana Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
Jumlah kegiatan monitoring atau patroli wilayah rawan ketertiban yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2
Tersusunya Laporan SAKIP	Laporan	1	1	1	1	1	1
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang di tindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
Jumlah rapat koordinasi/fasilitasi	Kegiatan	3	3	3	3	3	3

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA										
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD										
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT										
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SEBERANG KOTA									
2.	Rata-rata indeks desa	*	0	68,01	68,25	68,50	69,25	69,50	70,05	
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	*	81,53	85,05	85,50	86,15	88,20	89,25	90,05	
4.	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Nilai AKIP OPD	*	53,39	78	78,15	78,40	78,65	78,90	79	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI											
RANCANGAN AKHIR RENSTRA											
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT											
NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Jumlah rapat koordinasi/fasilitasi	komulatif	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	
3.	Jumlah sarana pelayanan publik		Unit	2	2	2	2	2	2	2	
4.	Persentase jumlah kelompok sasaran miskin/stunting yang mendapatkan manfaat langsung dari fasilitasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Jumlah kegiatan monitoring atau patroli wilayah rawan ketertiban yang dilaksanakan	komulatif	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	
6.	Terdatanya sarana/prasarana Kecamatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Tersusunnya laporan AKIP	komulatif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
8.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan SKM	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

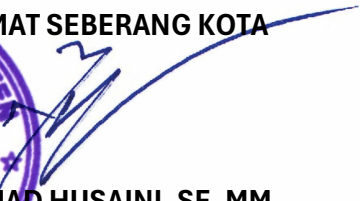
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan yang disusun untuk Periode 5 Tahun ini dimulai dari Tahun 2025, yang bertujuan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di tingkat Kecamatan.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan keterpaduan dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik antar perangkat daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun lembaga non pemerintah. Evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya dilakukan secara berkala melalui sistem pelaporan, monitoring, dan forum-forum musyawarah pembangunan tingkat kecamatan.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan seluruh unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, dan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan yang inklusif, partisipatif dan berkelanjutan demi mewujudkan *Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang BERKAH MADANI* — yaitu berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman, harmonis, mandiri, dan berinovasi.

Tungkal V, Oktober 2025

**CAMAT SEBERANG KOTA**
**AHMAD HUSAINI, SE, MM**
Pembina
NIP. 19750529 201001 1 007